2024

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

deputi3.kemenpora.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing kita untuk menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media informasi dan pola pengukuran akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi guna mewujudkan visi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Panduan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja. Keberhasilan kinerja organisasi diukur berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai perspektif.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memenuhi harapan Pimpinan Instansi dan hasilnya lebih baik dari kinerja sebelumnya dan sebagai pendorong untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 15 Januaari 2025

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Rudy Sufahriadi

NIP 196508232023211001

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
I.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur
I.4 Potensi Permasalahan
I.5 Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis 2020-2024 dan Pohon Kinerja
II.2 Rencana Kerja
II.3 Indikator Kinerja Utama
II.4 Perjanjian Kinerja
II.5 Postur Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja
III.2 Capaian Kinerja Organisasi
III.3 Realisasi Anggaran
III.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya
III.5 Dukungan terhadap Prioritas Nasional

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan
IV.2 Kendala dan Saran

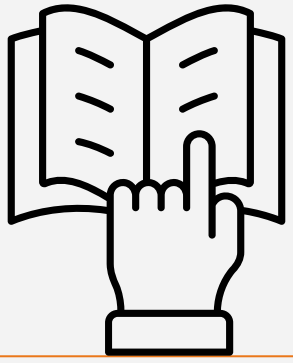

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat Laporan Kinerja (LKj) untuk mengukur capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan kinerja merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) juga diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua dokumen tersebut serta visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu:

"Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi acuan dalam program pembangunan olahraga tidak hanya peningkatan prestasi olahraga Indonesia, namun yang lebih penting adalah bagaimana olahraga dapat menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, bugar dan aktif di masa mendatang. Indonesia pada tahun 2045 menargetkan memiliki generasi emas yang mampu membawa kebangkitan dan kemajuan negara serta menciptakan peradaban yang unggul dari bangsa-bangsa lain di dunia. Generasi emas tidak akan tercipta dengan kondisi fisik dan mental sumber daya manusia (SDM) yang lemah, disinilah peran dunia olahraga sangat penting dalam menyiapkan SDM unggul yang memiliki tingkat kebugaran tinggi dan karakter yang kuat.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Pembudayaan Olahraga Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut berkaca dari Renstra Kemenpora 2020-2024 dan Desain Besar Olahraga Nasional. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang dirincikan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	40%	26,30%	65,75%
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%	19,60%	65,33%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	76,23	95,29%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88	83,45	94,83%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	76,48	84,04%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	89,10	96,85%
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	81,80	102,25%

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari sasaran yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa Deputi Pembudayaan Olahraga mempunyai 7 capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dihitung secara umum tercapai 86,33% atau berkategori Baik. Dalam capaian realisasi anggaran, **dari pagu sebesar Rp122.626.232.000 terjadi pemotongan anggaran Rp5.000.000.000 untuk tunjangan kinerja dan penambahan pemotongan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.097.000.000 sehingga pagu anggaran menjadi Rp115.529.232.000**. Realisasi daya serap yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Deputi Pembudayaan Olahraga sampai dengan Desember 2024 sebesar **Rp114.735.414.491 (99.31%).**

Jakarta, 15 Januaari 2025
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan salah satu cara yang dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Terkait dengan pelayanan keolahragaan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki sasaran program berupa meningkatnya partisipasi masyarakat berolahragadan terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu persentase penduduk usia 10 Tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat Indonesia. Dalam menerapkan Indikator kinerja utama, tugas dan fungsi di cascading kepada Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas, Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat. Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mewujudkan tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani.

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, sekaligus pertanggungjawaban guna menerangkan tingkat keberhasilan kinerja serta tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan Kinerja untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi unit kerja kedeputian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan melakukan evaluasi yang cenderung mengarah kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk ditingkatkan kearah yang lebih baik sesuai dengan program dan kebijakan Kementerian yang ditetapkan.

Untuk lebih jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mengacu dan berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan Laporan Kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 1 Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;
f. Pelaksanaan administrasi deputi bidang pembudayaan olahraga; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri pemuda dan olahraga.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 4 unit Eselon II yaitu Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas, Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat, dan Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga penyandang disabilitas;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan.

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga masyarakat;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputi;

b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi;

c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputi;

d. pengelolaan keuangan Deputi;

e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputi;

f. penyusunan laporan Deputi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

I.2 STRUKTUR ORGANISASI

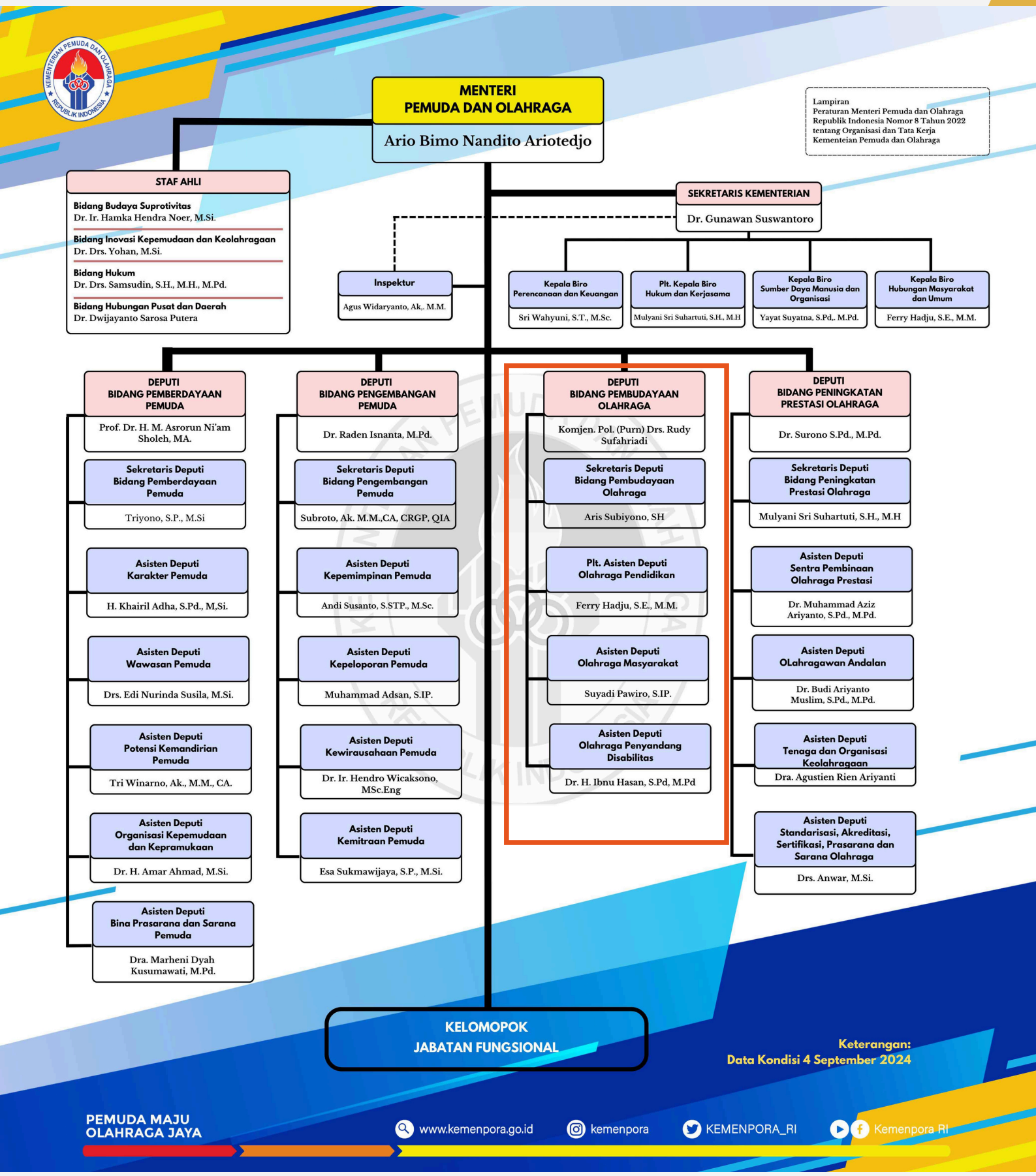

I.2 STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Komjen Pol. (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Aris Subiyono, SH

Plt. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Ferry Hadju, S.E., M.M.

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas

Dr. H. Ibnu Hasan, S.Pd, M.Pd

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat

Suyadi Pawiro, S.IP

I.3 KONDISI SDM APARATUR

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki SDM yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari. Pegawai pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berjumlah **110 orang** dengan rincian sebagai berikut:

No	Bagian	PNS	PPPK	Tenaga Honorer
1	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	21	8	3
2	Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas	13	1	6
3	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	17	2	4
4	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	22	6	7
Total		**73**	**17**	**20**

I.4 POTENSI PERMASALAHAN

Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada tahun 2024 terjadi perubahan pembentukan tim yang tidak lagi berdasarkan tingkat eselon atau struktural melainkan sistem tim kerja yang dikoordinir oleh ketua tim atau fungsional sehingga memerlukan adaptasi. Selain itu, tidak adanya pola kerja segregation of duties yang bisa menimbulkan potensi fraud. Penempatan SDM pada tim terkadang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2024 sebesar 0,334. Skor tersebut masuk kategori rendah dalam skala 0-1 (0-0,499 rendah; 0,500-0,799 menengah; 0,800-1 tinggi). Dari sembilan dimensi dalam IPO, indeks SDM, indeks performa, dan kebugaran jasmani capaiannya paling rendah. Sementara itu, indeks ekonomi, indeks perkembangan personal, dan indeks literasi capaiannya paling tinggi. Pola tersebut tampaknya relatif konsisten dari waktu ke waktu. Dibanding tahun 2023, capaian IPO tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,007. Artinya pada tahun 2024, sasaran program yang dijalankan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berdampak baik ke masyarakat. Pada tahun 2025, program pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dapat meningkatkan pembudayaan masyarakat agar target yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, terutama bagian SDM yang bertugas sebagai analis kebijakan dan pengelola keuangan.

I.4 POTENSI PERMASALAHAN

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk software dan aplikasi dalam menunjang kinerja

d. Aspek Anggaran

Kebijakan dari pihak luar Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan pendanaan program dan kegiatan yang sangat situasional sehingga satuan kerja harus secara cepat merubah susunan program dan kegiatan atau bahkan menghilangkan suatu program atau kegiatan

Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;

2) Legitimasi hukum keolahragaan, DBON, dan kebijakan organisasi;

3) Sumber daya manusia yang berkualitas;

4) Struktur organisasi yang jelas dari pusat;

5) Anggaran dan dukungan keuangan yang bersumber dari APBN.

I.4 POTENSI PERMASALAHAN

b. Kelemahan Organisasi

1) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah;

2) Masih menganut paham kebijakan tahun sebelumnya bisa relevan untuk dilaksanakan untuk tahun sekarang;

3) Kurangnya evaluasi dan monitoring atas program yang telah dilaksanakan secara berkala;

4) Komunikasi internal antar bagian dalam satu kedeputian;

5) Cascading kinerja yang masih belum runtut dan sesuai dengan sasaran program dan kegiatan Kementerian.

c. Potensi Organisasi

1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;

2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;

3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja;

4) Peluang kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Peluang Organisasi

1) Peraturan perundang-undangan tentang DBON yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah;

I.4 POTENSI PERMASALAHAN

3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat yang bisa dijadikan kesempatan untuk mengkampanyekan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

b. Ancaman Organisasi
1) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal yang menyebabkan konflik baik dengan satu bagian internal di UKE II, unit kerja lainnya di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, maupun satker lainnya;
2) Adanya kebijakan dari K/L lain yang bersumber dari arahan presiden terkait dengan pelaksanaan kinerja anggaran berupa pemotongan pagu;
3) Perubahan sosial budaya di zaman modern yang cepat.

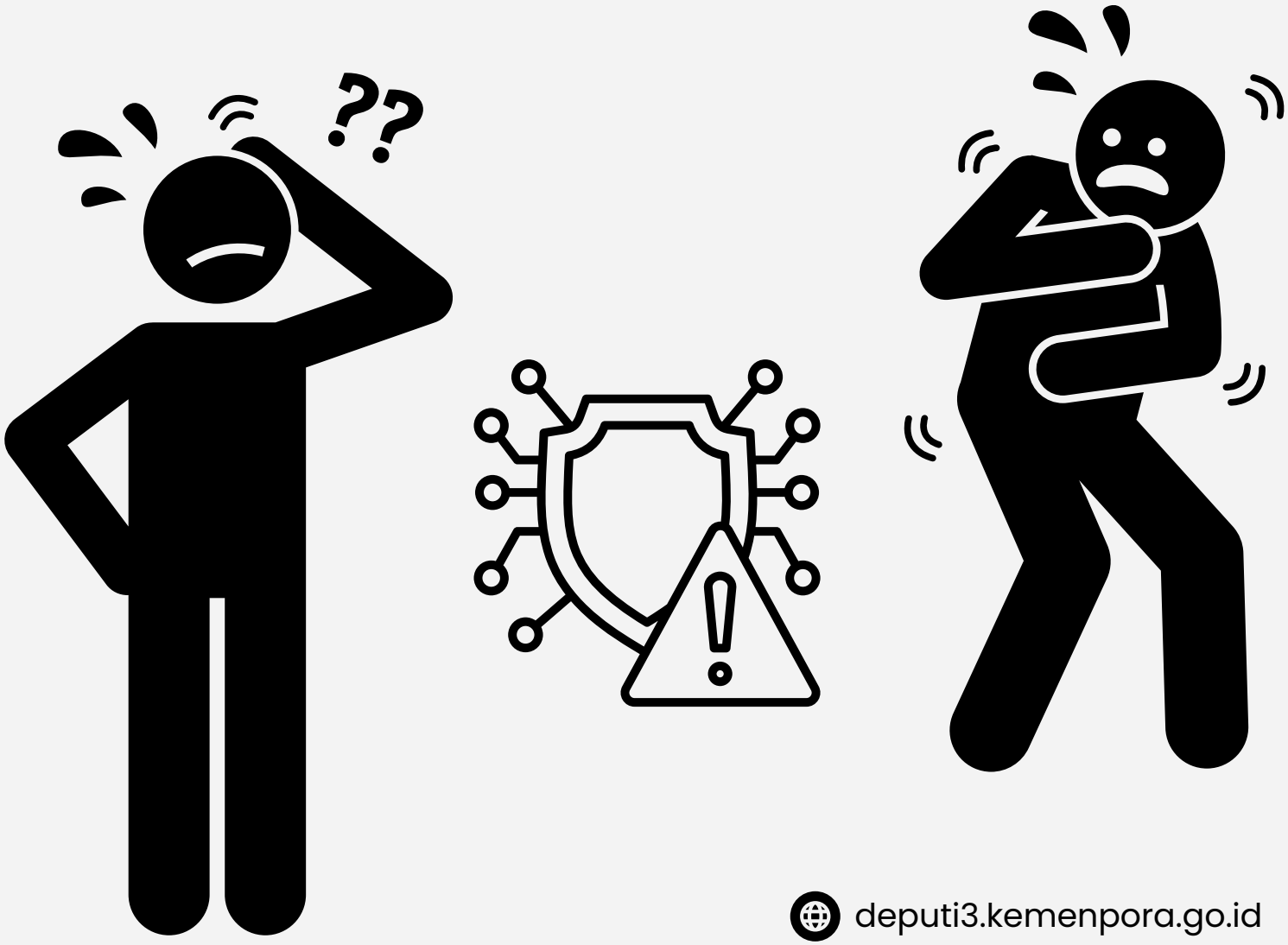

I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum terkait latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan visi misi dan rencana kerja serta anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 beserta rekomendasinya untuk perbaikan di masa yang akan datang.

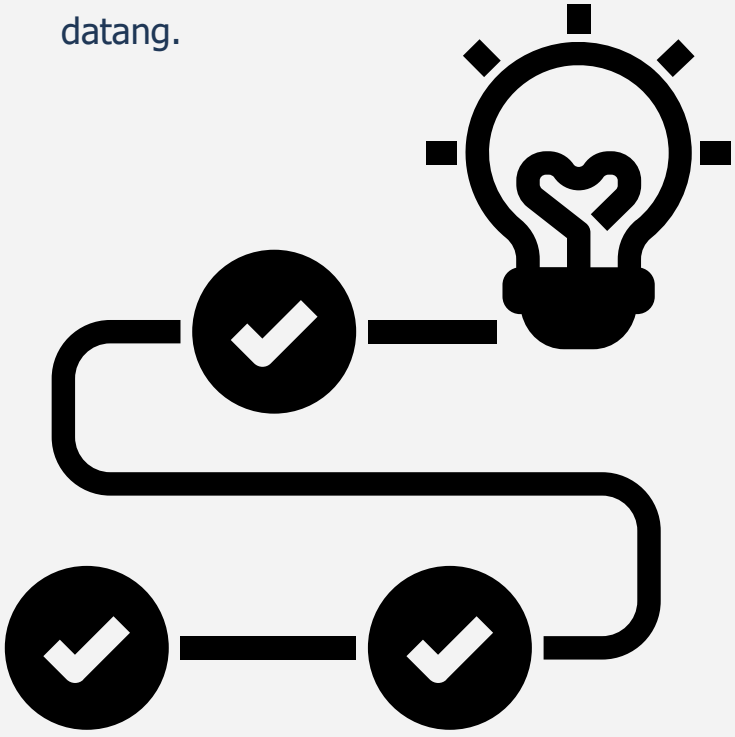

deputi3.kemenpora.go.id

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Perencanaan Kinerja Deputi Pembudayaan Olahraga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditandatangani di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga. Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam perencanaan kinerja harus ada komponen-komponen untuk mendukung capaian kinerja, yaitu melalui:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Kegiatan

kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

1.Visi

Mewujudkan Masyarakat yang berdaya saing dalam membudayakan olahraga

2. Misi

Meningkatkan daya saing atau potensi sumberdaya Keolahragaan

Visi dan Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan dan memajukan potensi sumber daya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga dan masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas.

2) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

II.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2020-2024 merujuk pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI telah mengakomodasikan kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan olahraga merupakan amanat dan kewajiban dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada agenda pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemenpora mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024.

Dalam menjabarkan target yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu:

1. Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan, Kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik
2. Pemberdayaan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan
3. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda
4. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan buga di kalangan masyarakat
5. Pembinaan usia dini dan Peningkatan prestasi yang terencana dan berkesinambungan

II.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

SCAN ME

II.1 POHON KINERJA

II.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serangkaian langkah intelektual yang dilakukan secara kolektif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian terkait kebijakan, kerangka pendanaan, kelembagaan, regulasi, serta evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana Kerja (Renja) berperan sebagai panduan pelaksanaan yang membantu menyelaraskan kegiatan sehari-hari dengan tujuan dan pencapaian organisasi.

Sebagai bentuk Rencana Kerja **Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga** melaksanakan 3 (tiga) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2024:

RO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal
Terdiri dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran.

RO 2 : Layanan Dukungan Manajemen Internal
Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Manajemen SDM.

RO 3 : Layanan Manajemen Kinerja Internal
Terdiri dari 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja.

Sebagai bentuk rencana kerja **Asisten Deputi Olahraga Masyarakat** melaksanakan 5 (sembilan) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu:

RO 1 : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah (1) Melakukan Persiapan dan Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga Berprestasi; dan (3) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

II.2 RENCANA KERJA

RO 2 : Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah (1) Melakukan Persiapan dan Koordinasi terkait pelaksanaan pengumpulan data IPO; (2) Pengumpulan data dan Pengolahan Data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO); serta (3) Mengevaluasi hasil Pengukuran.

RO 3 : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah (1) Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Lembaga dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata; (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata; serta (3) Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi.

RO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah (1) Melakukan Persiapan dan Koordinasi Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata; (2) Penyelenggaraan Kampanye/Festival Olahraga Rekreasi, Massal , Petualang, Tantangan dan Wisata berupa kegiatan Penyelenggaraan Haornas, Kejuaraan Tarkam, Festival Olahraga Tradisional, ASEAN Sports Day, Pelatihan SDM Industri dan Summit Sport Industry; (3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye.

RO 5 : Bantuan Lembaga

Untuk mewujudkan sasaran ini, upaya yang dilakukan adalah (1) Melakukan Persiapan Berupa Seleksi Administrasi atas proposal yang masuk; (2) Penyaluran Bantuan Prasarana dan Sarana atas Proposal yang lolos seleksi; (3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

II.2 RENCANA KERJA

Sebagai bentuk Rencana Kerja **Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas** melaksanakan 4 (empat) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2024 :

RO 1 : Koordinasi
Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Provinsi Dengan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terbina untuk Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dengan Stakeholder Olahraga Penyandang Disabilitas.

RO 2 : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Kebijakan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Yang Tersusun.

RO 3 : Bantuan Lembaga
Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas Yang Terfasilitasi Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.

RO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dan diturunkan untuk 5 (lima) kegiatan, yakni Festival Olahraga Disabilitas, Pelatihan SDM Pembina Olahraga Disabilitas, Promosi dan Publikasi Olahraga Penyandang Disabilitas, Kemitraan Olahraga Penyandang Disabilitas Lintas Sektoral, Pengembangan Sistem Informasi Olahraga Disabilitas.

II.2 RENCANA KERJA

Sebagai bentuk Rencana Kerja **Asisten Deputi Olahraga Pendidikan** Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2024 :

KODE DAN NAMA KOMPONEN		TARGET	PAGU
3821	**Pengembangan Olahraga Pendidikan**		**39.967.658.000**
3821.QDB.001	**Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di Pendidikan Dasar , Menengah dan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat**	**104 LEMBAGA**	**3.924.942.000**
054	Pemberian Fasilitas Pembinaan Bantuan Penyelenggaraan pada warga Belajar/Physical Activity		1.572.722.000
055	KIE Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Jasmani		2.352.220.000
3821.QDC.001	**Peserta Kampanye Olahraga Olimpik disekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Non formal dan Informal yang Terfasilitasi**	**170.000 Orang**	**31.803.750.000**
051	Persiapan dan Koordinasi		4.783.991.000
052	Penyelenggaraan Kampanye Festival Sepakbola Usia Dini Sekolah Dasar Piala Menpora		9.233.251.000
053	Penyelenggaraan Kampanye/Festival Olahraga Pendidikan		7.865.817.000
054	Pemanduan Bakat		9.920.691.000
3821.QDC.002	**Peserta Kampanye Olahraga Pendidikan yang Terfasilitasi**	**2174 Orang**	**750.000.000**
051	Persiapan dan Koordinasi		750.000.000
3821.QEI.001	**Lembaga Yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan**	**2 Lembaga**	**571.107.000**
051	Seleksi Administrasi dan Bimtek Bagi Calon Penerima Bantuan		48.000.000
052	Penyaluran Bantuan Prasarana Olahraga Pendidikan		405.500.000
053	Monitoring dan Evaluasi		117.607.000
3821.QEI.002	**Lembaga Yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan**	**185 Lembaga**	**2.917.859.000**
051	Seleksi Administrasi Bagi Calon Penerima Bantuan		100.000.000
052	Penyaluran Bantuan Sarana Olahraga Pendidikan		2.705.450.000
053	Monitoring Evaluasi		112.409.000

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rentang waktu 2020-2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengalami perubahan SOTK sekali dan juga perubahan jabatan dari struktural menjadi jabatan fungsional, ini tentu mempengaruhi Indikator Kinerja Utama yang tersusun selama lima tahun. Dan pada Laporan Kinerja ini Indikator Kinerja Utama akan menampilkan sesuai SOTK baru yang tergambar dan menyesuaikan kegiatan yang tercantum dalam Rincian Kertas Kerja Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	33,87%	35,4%	36,39%	37%	40%
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	23%	23,5%	26%	28%	30%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	69	70	70	70	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	84	85	86	87	88
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	87,5	88	89	90	91
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	69%	70%	70%	70%	80%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	84	86	88	90	92

II.4 PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi,misi, tujuan dan sasaran selama periode waktu tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Rencana Aksi

Rencana aksi ini menggambarkan rencana Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan disusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya unit secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja serta target pencapaian kinerja lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Tersusunnya Rencana Aksi dapat menjadi tolak ukur dalam pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiataan, serta memuat pembagian target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja. Rencana aksi tahun 2024 terlampir di lampiran Laporan Kinerja (LKj).

II.4 PERENCANAAN KINERJA

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024 yang ditetapkan secara tersendiri. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IKU
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	40%	√
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%	√
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88	-
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	-
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	-

II.5 POSTUR ANGGARAN

Pada bagian selanjutnya disajikan data dukungan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024
SESUAI DENGAN DIPA AWAL NOMOR: DIPA-092.01.1.418139/2024

No	Kode Program	Unit Teknis	Pagu Anggaran
1	3820	Asisten Deputi Bidang Olahraga penyandang disabilitas	Rp17.467.842.000
2	3821	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	Rp42.208.958.000
3	3822	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	Rp57.949.432.000
4	1720	Dukungan Manajemen Deputi Pembudayaan Olahraga	Rp5.000.000.000
		Total Pagu Anggaran	Rp122.626.232.000

Pada pelaksanaannya disepanjang tahun 2024, terdapat beberapa kali revisi dan penyesuaian anggaran diantaranya revisi buka blokir dan revisi internal mengikuti dengan kondisi, kebutuhan, dan perubahan pola pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, termasuk revisi pemotongan anggaran untuk Tunjangan Kinerja dan penghematan anggaran untuk perjalanan dinas.

No	Kode Program	Unit Teknis	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran setelah *Self-blocking*
1	3820	Asisten Deputi Bidang Olahraga penyandang disabilitas	Rp16.967.842.000	Rp16.770.842.000
2	3821	Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan	Rp39.967.658.000	Rp39.044.658.000
3	3822	Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat	Rp55.690.732.000	Rp54.713.732.000
4	1720	Dukungan Manajemen Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp5.000.000.000	Rp5.000.000.000
		Total Pagu Anggaran	Rp117.626.232.000	Rp115.529.232.000

deputi3.kemenpora.go.id

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan pada salah satu domain Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yaitu partisipasi masyarakat berolahraga pada penduduk umur 10 tahun ke atas dalam seminggu terakhir.
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	Indikator pada dimensi kebugaran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan VO2max, yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobic maksimum. Subdimensi dari kebugaran adalah daya tahan kardiovaskuler. Instrumen pengambilan data subdimensi tersebut adalah tes lapangan (*Multistage Fitness Test* atau *Beep Test*) dimana responden melakukan lari bolak-balik 20 m terus menerus dan individu harus mencapai garis 20m sebelum berbunyi beep berikutnya. $\frac{\quad}{\quad} x\ 100\%$ Nilai Aktual: Skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan (rata-rata hasil pengukuran tes MFT pada 34 provinsi)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada Satuan Kerja oleh Inspektorat Kemenpora (berdasarkan data yang ada pada LKJ tahun sebelumnya). Nilai yang dipergunakan pada indikator ini adalah nilai yang terdapat pada berita acara. Nilai yang digunakan adalah

III.1 PENGUKURAN KINERJA

	berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional		data tahun sebelumnya yang merupakan jumlah nilai rata-rata dari seluruh unit kerja pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Komponen yang dihitung adalah Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), dan Capaian Kinerja (20%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$ Berdasarkan nilai IKPA yang diperoleh dari Menu Monev PA pada aplikasi OMSPAN di akhir tahun 2024 masing-masing SATKER. Terdapat 7 indikator yang dinilai yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Capaian Output (25%).
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan nilai kinerja yang ada pada aplikasi E-SMART yang ada pada masing-masing SATKER tahun 2024. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2024, nilai NKA dibentuk oleh 2 komponen utama penilaian yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari 2 komponen yaitu Efisiensi dan Efektivitas. Nilai Efisiensi dilihat dari Penggunaan SBK (Standar Biaya

III.1 PENGUKURAN KINERJA

			Khusus) dan Efisiensi dari SBK. Sedangkan Nilai efektivitas dilihat dari Capaian Rincian Output. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai yang didapat dari nilai IKPA OM-SPAN. Nilai tersebut di-*generate* langsung dari OM-SPAN.
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan data Real Time per 31 Desember 2024 pada aplikasi eSKM. Terdapat 9 komponen penilaian yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana. Sembilan unsur tersebut dituangkan ke dalam 9 pertanyaan yang ada di kuesioner. Desain jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert.
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan jumlah rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan dari tahun 2019 pada masing-masing satuan kerja. Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing satuan kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui Nota Dinas kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

III.2 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya.

Dalam mengukur kinerja Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output dan outcome, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator masukan berupa dana, sedangkan indikator keluaran dan hasil meliputi jumlah orang, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya. Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcome).
2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

III.2 CAPAIAN KINERJA

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Sebagai salah satu elemen terpenting dalam penerapan Laporan Kinerja, tahapan pengukuran kinerja mencangkup penetapan indikator kinerja keberhasilan (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah tabel pengukuran kriteria ketercapaian target indikator:

Rentang Capaian (%)	Kategori Capaian	Keterangan
Capaian ≥ 90	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
70 < Capaian ≤ 90	Baik	
50 < Capaian ≤ 70	Cukup	
Capaian ≤ 50	Kurang	

III.2 CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan perjanjian kinerja organisasi di Deputi Pembudayaan Olahraga Tahun 2024, maka hasil capaian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	40%	26,3%	65,75%
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%	19,6%	65,33%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional, dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	76,23	95,28%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88	83,45	94,83%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	76,48	84%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	89,04	96,78%
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	81,8%	102,25%

III.2 CAPAIAN KINERJA

Dari sasaran yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa Deputi Pembudayaan Olahraga mempunyai 7 capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dihitung secara umum tercapai **86,31% atau berkategori Baik.** Ada 2 indikator kinerja utama yang belum tercapai yaitu Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir dan Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia.

Dalam capaian realisasi anggaran, dari pagu sebesar Rp115.529.232.000 dengan realisasi daya serap berdasarkan asumsi kegiatan yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp114.603.871.711 (99,31%).

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	Target	33,87%	35,40%	36,39%	37%	40%
	Realisasi	N/A	28,60%	28,4%	25,4%	26,3%

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (yang selanjutnya disingkat IPO) tahun 2024. Laporan IPO tahun 2024 kali ini menyertakan hasil survei yang dilakukan di 38 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 20.000< responden di 588 kecamatan dan 246 kabupaten/kota. Responden berusia 10-60 tahun, terdiri dari 50,6% laki-laki dan 49,4% perempuan. Pada pengukuran tersebut didapatkan nilai akhir dari IPO adalah 33,4% dengan rincian sebagai berikut:

Pada gambar di atas bisa dilihat bahwa Tingkat partisipasi olahraga Masyarakat Indonesia dari hasil sampling IPO adalah sebesar 26,3%. Dari sembilan dimensi dalam IPO, indeks SDM, indeks performa, dan kebugaran jasmani capaiannya paling rendah. Sementara itu, indeks ekonomi, indeks perkembangan personal, dan indeks literasi capaiannya paling tinggi

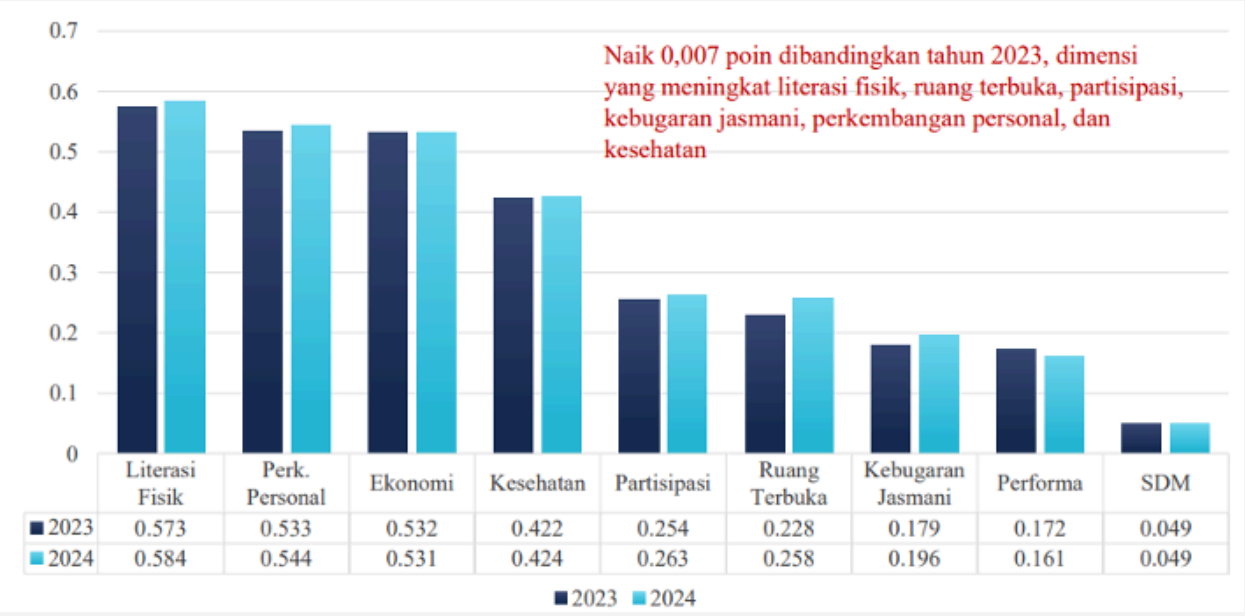

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dibanding tahun 2023, capaian IPO tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin. Terkait dengan kenaikan capaian pembangunan pada tahun 2024 ini, ada tiga dimensi yang perlu mendapatkan perhatian, yakni indeks partisipasi, indeks kebugaran, dan indeks ekonomi. Ketiga indeks tersebut mempengaruhi satu sama lain. Jika angka partisipasi naik, maka tingkat kebugaran juga akan naik. Naiknya angka partisipasi juga berdampak pada kenaikan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas olahraga.

Terkait dengan bidang pembudayaan olahraga, terdapat dua dimensi yang dijadikan indikator kinerja yakni tingkat partisipasi dan kebugaran jasmani. Dalam kedua hal tersebut, capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Angka partisipasi tahun ini sebesar 26,3%, naik 0,09% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 25,4%. Ketiadaan terobosan program intervensi selama tahun 2024 menyebabkan peningkatan indeks tersebut menjadi tidak mudah untuk disimpulkan secara final. Patut diduga, peningkatan sebesar 0,007 poin tersebut disebabkan karena semakin luasnya implementasi program Tarkam pada sejumlah daerah. Tarkam memang hanya menyasar sejumlah titik di sejumlah wilayah dan bersifat jangka pendek. Namun ada kemungkinan resonansi kegiatan tersebut masih terasa hingga pengukuran IPO dilakukan. Selain itu, banyak event besar digelar pada tahun 2024, seperti sepakbola, bola voli, dan bulutangkis. Mengacu pada logika teori modelling, masyarakat akan meniru apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Dalam ini, prinsip trickle-down effect tampaknya berlaku pada situasi tersebut.

Jakarta: Dalam rangka mengoptimalkan survei pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), Kemenpora mengadakan bimbingan teknis (bimtek) tentang Tata Cara Pengambilan dan Penginputan Data IPO yang berlangsung pada 5-7 Agustus 2024 di Hotel Belezza, Jakarta.

Hadir sebagai narasumber, Prof. Toho Cholik Mutohir Prof. Ali Maksum, Prof. Agus Kristiyanto dan Reesa Akbar.

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 50 peserta yang terdiri dari Dispora Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian atas hasil penghitungan Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2024 tidak boleh disepelekan, diperlukan perubahan untuk merumuskan intervensi kebijakan dan program aksi yang lebih konkrit guna menghentikan laju penurunan serta berupaya menaikkan kembali capaian pembangunan olahraga secara nasional. Angka partisipasi berhubungan dengan angka kebugaran jasmani dan ekonomi olahraga. Semakin tinggi angka partisipasi, semakin tinggi pula angka kebugaran jasmani dan ekonomi olahraga. Semakin rendah angka partisipasi, semakin rendah pula angka kebugaran jasmani dan ekonomi olahraga. Langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inovasi kebijakan/kegiatan yang tidak berfokus pada kegiatan yang bersifat seremonial, sporadik, dan pengumpulan jumlah massa saja, namun berfokus pada dampak/outcome yang dihasilkan contohnya peningkatan intensitas masyarakat berolahraga agar dampak yang dihasilkan sifatnya tidak sementara, terutama hanya saat kegiatan tersebut diselenggarakan;
2. Adanya kegiatan yang berfokus pada 1 lokus tertentu dan dimonitor secara berkala bagaimana dampak dari kebijakan/kegiatan tersebut terhadap tingkat partisipasi masyarakatnya dalam berolahraga (aspek pembangunan berkelanjutan);
3. Inovasi kegiatan yang berusaha untuk merangkul semua kalangan masyarakat, bukan hanya kelompok/kalangan olahraga tertentu saja yang menghadiri kegiatan tersebut;
4. Memanfaatkan sosial media sebagai jembatan untuk mempengaruhi (influence) masyarakat untuk berolahraga;
5. Mempromosikan dan merekrut volunteer dalam olahraga/aktivitas fisik di tengah keterbatasan jumlah ketenagaan dibidang olahraga;
6. Perbaikan cascading atas indikator kinerja dari UKE I ke UKE II yang lebih akuntabel dan berbasis outcome.

Jakarta : Kemenpora menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Berbasis Data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), di Hotel Santika Premier Slipi Jakarta pada Selasa s.d. Kamis, 28 sd 30 Mei 2024 (tbs).

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam usaha menaikkan tingkat partisipasi Masyarakat, tahun 2024 telah melakukan berbagai upaya melalui program keolahragaan unggulan yang diselenggarakan oleh 3 unit teknis Eselon II. Perincian atas pelaksanaan beberapa kegiatan keolahragaan tersebut adalah sebagai berikut:

a.Olahraga Pendidikan

- **Festival Olahraga Pendidikan**

Festival Olahraga Pendidikan (FOP) Tahun 2024 adalah sebuah program kerja lanjutan dan inisiatif terbaru dari model-model kegiatan Festival Olahraga Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya olahraga dalam dunia Pendidikan untuk mencapai tingkat kebugaran. Program ini dilaksanakan secara terjadwal di 30 titik kabupaten dan kota di Indonesia, melibatkan berbagai kegiatan kompetitif, edukatif, dan rekreatif yang diikuti oleh peserta didik dari jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK, sederajat.

Tujuan Kegiatan Festival Olahraga Pendidikan adalah:

-Mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman tentang keoelahragaan dan Kesehatan peserta didik;
-Menumbuhkan sikap dan perilaku hidup sehat peserta didik melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga;
-Memfasilitasi pembelajaran tentang dan melalui kompetisi sehat;
-Menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga dan pada akhirnya mengembangkan gaya hidup aktif sepanjang hayat;
-Mengembangkan keterampilan social seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan;
-Meningkatkan rasa persaudaraan antar generasi muda Indonesia;
-Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenali dan memahami keragaman budaya melalui permainan dan olahraga tradisional.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

No.	Kabupaten/Kota	Jadwal Pelaksanaan
1.	Kabupaten Kendal	13-15 Juli 2024
2.	Kota Bitung	18-20 Juli 2024
3.	Kabupaten Pacitan	25-27 Juli 2024
4.	Kabupaten Paser	29-31 Juli 2024
5.	Kota Tangerang Selatan	02-04 Agustus 2024
6.	Kabupaten Belitung Timur	06-08 Agustus 2024
7.	Kota Makassar	07-08 Agustus 2028
8.	Kabupaten Gorontalo Utara	06-08 Agustus 2024
9.	Kota Kupang	07-09 Agustus 2024
10.	Kabupaten Lombok Barat	11-13 Agustus 2024
11.	Kabupaten Musi Banyuasin	14-16 Agustus 2024
12.	Kabupaten Bandung Barat	18-20 Agustus 2024
13.	Kota Tual	20-22 Agustus 2024

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

14.	Kabupaten Nganjuk	27-29 Agustus 2024
15.	Kabupaten Lebak	08-09 September 2024
16.	Kabupaten Cirebon	8-10 September 2024
17.	Kabupaten Indramayu	8-10 September 2024
18.	Kabupaten Sumenep	9-11 September 2024
19.	Kabupaten Rejang Lebong	10-12 September 2024
20.	Kabupaten Buleleng	11-13 September 2024
21.	Hulu Sungai Selatan	12-14 September 2024
22.	Kabupaten Lampung Barat	17-19 September 2024
23.	Kota Sukabumi	18-20 September 2024
24.	Kabupaten Majalengka	18-20 September 2024
25.	Kota Kediri	24-26 September 2024
26.	Kota Jayapura	24-26 September 2024
27.	Kabupaten Bogor	24-26 September 2024
28.	Kota Bontang	17-19 Oktober 2024
29.	Kabupaten Grobogan	22-24 Oktober 2024
30.	Kabupaten Klungkung	18-20 Oktober 20204

Kediri : Festival Olahraga Pendidikan (FOP) Kemenpora di Kota Kediri resmi dibuka pada Rabu 25 September 2024. Acara digelar selama 3 hari hingga 27 September di Ngronggo Art Sport Center (NASC)
Jl. Super Semar Kediri. Sebanyak 1.000 siswa (dari 100 Sekolah SD,SMP, SMA) dan 100 guru pendamping berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.(tn).

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **Festival Sepak Bola U-12**

Kegiatan ini sebagai salah satu wujud nyata kemenpora mendukung Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional serta dukungan sebagai salah satu cabor prioritas DBON dalam perspektif prestasi dan insdustri olahraga yang memerlukan pembinaan mulai tingkat akar rumput (grassroot).

Selain itu, kegiatan ini sebagai ajang mengaktualisasikan minat dan bakat bibit-bibit potensial pesepakbola Indonesia dengan memberikan wadah dan pengalaman serta jam terbang perkompetisi baik di dari tingkat daerah, regional hingga nasional, serta sebagai ajang talent scouting bagi pengamat-pengamat dan pencari abakt sepakbola untuk kemudian diarahkan ke klub-klub besar bahkan dapat diarahkan mengikuti ajang seleksi Timnas Garuda Usia Muda di kemudian hari.

Peserta

Kemenpora bekerjasama dengan tim daerah untuk melaksanakan seleksi tingkat regional untuk mengikuti seri nasional tahun ini. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai berikut:

No.	TIM	No.	TIM
1.	JUARA 1 Seri Regional Medan	9.	JUARA 1 Seri Regional Samarinda
2.	JUARA 1 Seri Regional Palembang	10.	JUARA 1 Seri Regional Banjarmasin
3.	JUARA 1 Seri Regional Jakarta	11.	JUARA 1 Seri Regional Ambon
4.	JUARA 1 Seri Regional Bandung	12.	JUARA 1 Seri Regional Jayapura
5.	JUARA 1 Seri Regional Surabaya	13.	JUARA 2 Seri Regional Denpasar
6.	JUARA 1 Seri Regional Denpasar	14.	JUARA 2 Seri Regional Bandung
7.	JUARA 1 Seri Regional Kupang	15.	JUARA 2 Seri Regional Surabaya
8.	JUARA 1 Seri Regional Makassar	16.	JUARA 3 Seri Regional Surabaya

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan Regional

1. Medan	24-25 Agustus 2024
2. Palembang	24-25 Agustus 2024
3. Jakarta	10-11 Agustus 2024
4. Bandung	10-11 Agustus 2024
5. Surabaya	24-25 Agustus 2024
6. Denpasar	24-25 Agustus 2024
7. Kupang	23-24-25 Agustus 2024
8. Makasar	22-23-24 Agustus 2024
9. Samarinda	23-24-25 Agustus 2024
10.Banjarmasin	9-10-11 Agustus 2024
11.Ambon	22-23-24 Agustus 2024
12.Jayapura	31 juli-3 Agustsus 2024

Pelaksanaan Nasional

Kegiatan dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya, berlangsung selama 3 hari, pada tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2024

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

·Festival Anak Usia Dini

Tujuan utama dari pembinaan dan pengembangan olahraga di usia dini adalah membuat anak-anak sejak dini mengenal dan menyukai olahraga sehingga akan merubah pola pikir akan kegemarannya dalam beraktivitas fisik secara rutin sesuai usianya melalui berbagai bentuk-bentuk permainan olahraga, diharapkan dengan beraktivitas dan berolahraga bukan hanya menguatkan fisik, tetapi juga sebagai media penanaman pendidikan karakter dimana olahraga dapat membangun disiplin, membangun karakter sportif (bahwa menang dan kalah itu biasa), membangun karakter pejuang dan pekerja keras, memperkuat karakter kolaborasi dalam teamwork dan bahkan memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme serta meningkatkan kebugaran jasmani dengan target utama adalah membudayakan olahraga dan mendukung prestasi Indonesia

Tujuan Pelaksanaan festival adalah untuk mendukung Program Desain Besar Olahraga Nasional sebagai bagian rencana aksi periode tahun 2024 Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Memberikan edukasi kebugaran sejak usia dini dan kepada orang tua serta guru di TK/RA Memberikan pengalaman ragam gerak pada anak-anak usia dini sebagai pondasi dalam aktivitas olaharaga di usia selanjutnya Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah mendapatkan gambaran Gerak Dasar anak usia dini dan Artikel Ilmiah Nasional & Internasional terkait olahraga usia dini. Selain itu program yang diikuti sekolah dapat diterapkan pada peserta didik lainnya di sekolah masing-masing.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

b. Olahraga Masyarakat

·TARKAM

Kejuaraan TARKAM diselenggaran di 95 lokasi yang tersebar di 36 Provinsi. Antusias Masyarakat setempat dalam mengikuti kejuaraan ini cukup besar, adapun cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Senam yang merupakan kolaborasi Kemenpora dan Kemenkes, lalu atletik yang dapat dipilih fun run atau lari cepat jarak 60m dan 80m, kedua cabor tersebut adalah cabor wajib dilaksanakan. Selanjutnya 3 cabor pilihan adalah bola voli, bulutangkis dan tenis meja yang akan dipilih 2 cabor dari 3 cabor pilihan sehingga ada 4 cabor yang dilaksanakan. Total peserta Tarkam sebanyak 107.554 orang Pelaksanaan tarkam di tiap daerah tentu saja berbeda, beberapa daerah melaksanakan pembukaan dengan hiburan kearifan lokal. Prasarana pun masih banyak yang sangat minim, namun ini tidak mengurangi semangat Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Outcomes program kegiatan antara lain:

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga;
2) Meningkatnya tingkat kebugaran dan imunitas tubuh.

·HAORNAS

Peringatan Haornas tahun 2024 sedikit berbeda dan istimewa, karena bersamaan dengan pembukaan PON Aceh- Sumut yang diselenggaran pada tanggal 9 September 2024, walaupun acara seremonial peringatan HAORNAS tidak dilaksanakan tersendiri namun tidak mengurangi nilai HAORNAS itu sendiri, bahkan ini menjadi momentum dan sekaligus mengenang kembali PON pertama di Solo pada tanggal 9 September 1948, Dimana seperti diketahui bahwa HAORNAS sebenarnya merujuk pada pelaksanaan PON perdana di Solo.

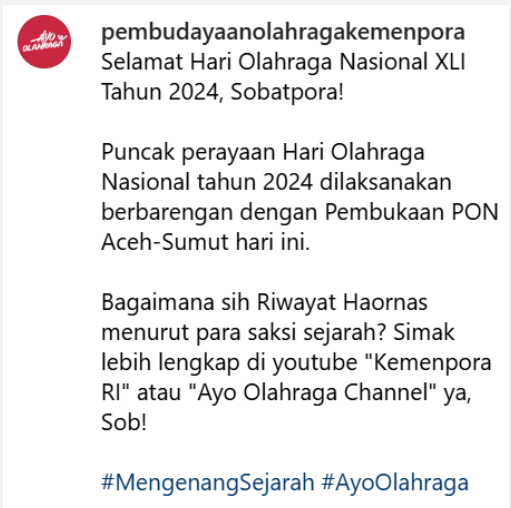

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

b. Olahraga Masyarakat

·FOTRADNAS

Dalam kegiatan Kampanye Olahraga Tradisional sebagai salah satu bentuk Upaya pemerintah melestarikan dan menjaga olahraga tradisional Indonesia setiap dua tahun sekali menyelenggarakan Festival Olahraga Tradisional (FOTRADNAS). Tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2024 yang diikuti sebanyak 13 perwakilan provinsi dan 1 perwakilan kabupaten. Pada festival ini yang keluar sebagai penampil terbaik adalah Provinsi Bangka Belitung yang selanjutnya menjadi perwakilan Indonesia dalam menampilkan olahraga tradisional pada perayaan ASEAN Sports Day tahun 2024 di Kabupaten Sleman, DIY. Outcomes program kegiatan antara lain:

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga;
2) Meningkatnya tingkat kebugaran dan imunitas tubuh;
3) Terjaganya kelestarian olahraga tradisional Indonesia.

·Industri Olahraga

Pelatihan SDM Industri dilaksanakan di 3 kota yaitu Soreang, Kab Bandung Barat tanggal 38 Februari s.d 1 Maret 2024, Kota Malang tanggal 21 s.d 23 Juli 2024 dan Sleman, DIY tanggal 7 s.d 9 Agustus 2024. Kegiatan ini melibatkan UMKM olahraga dan klub olahraga dengan total peserta 177 orang, dari jumlah tersebut secara gender terbagi laki-laki 72,88% dan Perempuan 27,12%. Sedangkan kegiatan Sport Industry Summit dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sesi talkshow terkait "Industri Olahraga". Peserta kegiatan yang terlibat sebanyak 386 orang yang terdiri dari para stakeholder industri olahraga. Outcomes program kegiatan antara lain:

1) Meningkatnya jumlah Komunitas Olahraga, Lembaga/Yayasan pemerhati olahraga;
2) Meningkatnya SDM dilingkungan industri olahraga;
3) Meningkatnya industri olahraga.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

c. Olahraga Penyandang Disabilitas

·Festival Olahraga Disabilitas

Festival Olahraga Disabilitas adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan olahraga inklusif, menginspirasi masyarakat, dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar festival ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang maksimal.

Festival Olahraga Disabilitas bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebuah perayaan semangat inklusivitas dan persamaan hak dalam berolahraga. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Dampak Jangka Panjang dari pelaksanaan Festival Olahraga Disabilitas adalah :

- Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam olahraga secara konsisten.
- Menciptakan budaya olahraga yang inklusif dan merata di masyarakat.
- Meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas karena olahraga memberikan manfaat fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas.
- Mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penguatan inklusi sosial.

·Pelatihan SDM Olahraga Penyandang Disabilitas

Pelatihan SDM Olahraga Disabilitas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk meningkatkan kompetensi pembina olahraga disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM olahraga disabilitas dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2. Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	Target	23%	23,50%	26%	28%	30%
	Realisasi	N/A	20,3%	18,5%	17,9%	19,6%

Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan V02max, yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi V02max, menunjukkan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang. Indeks kebugaran jasmani pada tahun 2024 sebesar 0,196, naik 0,017 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,179.

Meskipun indeks kebugaran jasmani mengalami peningkatan, namun mereka yang masuk pada kategori "kurang sekali" masih sangat besar, yakni 55,5% atau setara dengan 114 juta orang dan mereka yang masuk kategori "kurang" sebesar 24,7% atau setara dengan 50,7 juta orang. Mereka yang kebugaran jasmaninya masuk kategori "baik ke atas" hanya sebesar 6,3% atau setara dengan 12,9 juta orang.

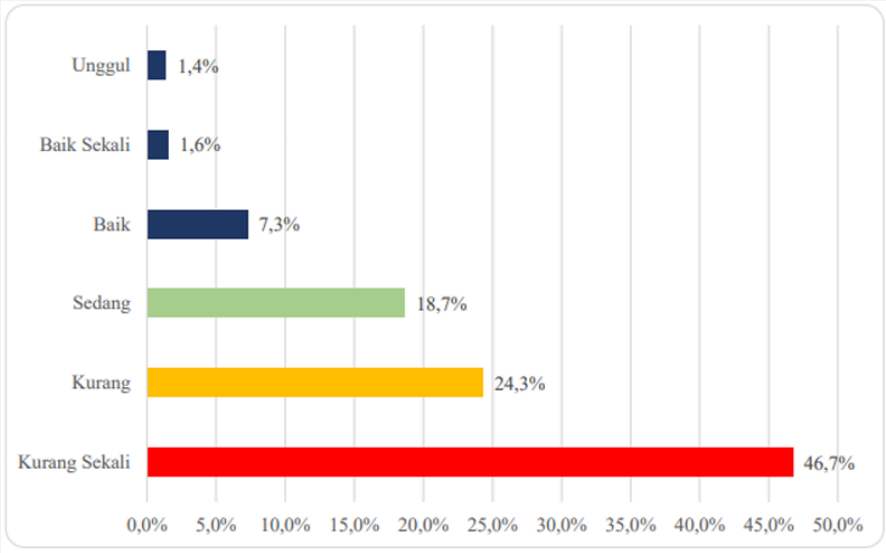

Gambar 2. 7. Tingkat Kebugaran Jasmani Anak Usia 10-15 Tahun

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagi anak usia 10-15 tahun, tingkat kebugaran jasmani menjadi urgen seiring upaya pembentukan modal manusia menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat kebugaran jasmani anak usia 10-15 tahun masih didominasi oleh kelompok "Kurang Sekali" sebanyak 46,7%. Fakta tersebut merupakan alarm call, mengingat kebugaran jasmani merupakan intangible asset yang menjadi faktor krusial dalam peningkatan kualitas SDM, baik dari aspek kognitif-intelektual maupun kesehatan fisik-psikis menuju Indonesia Emas 2045.

Tingkat partisipasi dalam berolahraga pada gilirannya juga berpengaruh pada tingkat kebugaran jasmani. Laporan ini menyatakan bahwa tingkat kebugaran jasmani pemuda yang masuk kategori "baik ke atas" sebesar 6,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 5,03%. Meskipun demikian perlu diingat bahwa mereka yang kebugaran jasmaninya masuk pada kategori "kurang sekali" masih sangat besar, yakni 58,2%. Demikian juga yang masuk pada kategori "kurang" sebesar 21,8%.

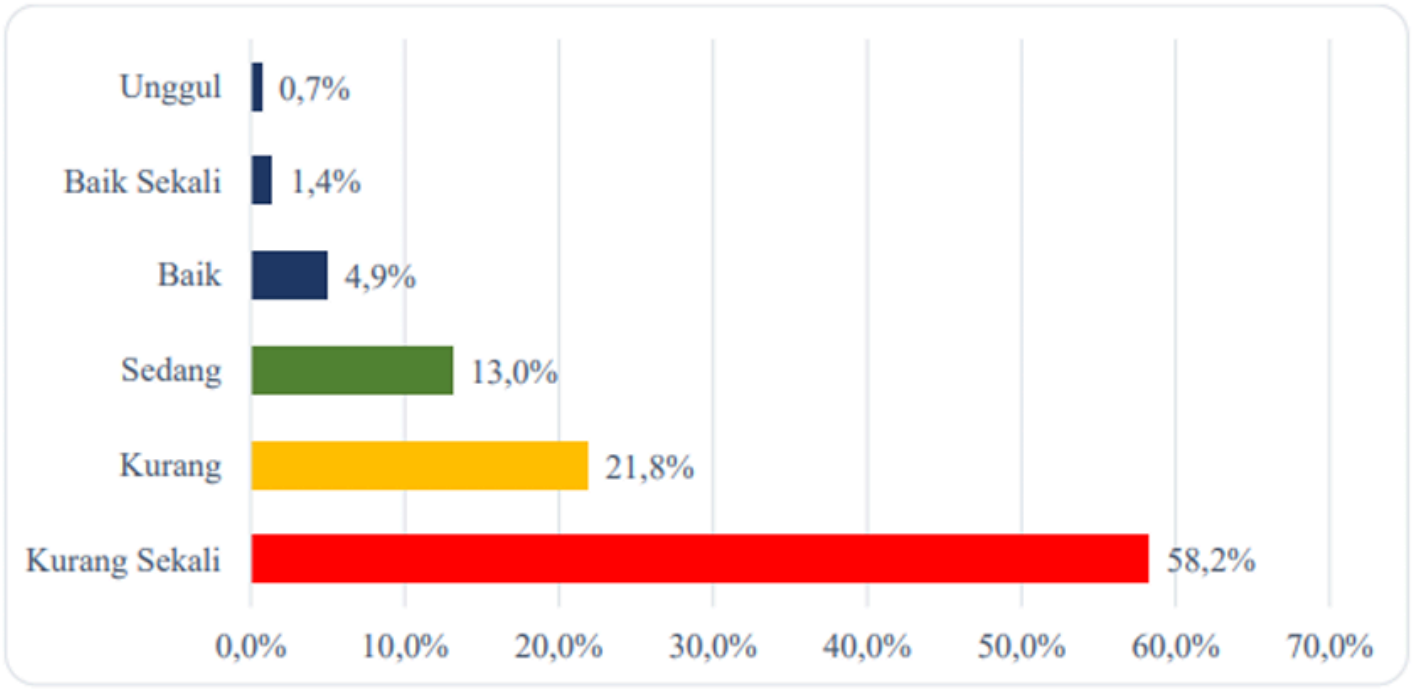

Gambar 2. 16. Tingkat Kebugaran Jasmani Pemuda Tahun 2024

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam usaha menaikkan tingkat kebugaren Masyarakat, tahun 2024 telah melakukan berbagai upaya melalui program keolahragaan yang diselenggarakan oleh 3 unit teknis di bawahnya. Perincian atas pelaksanaan beberapa kegiatan keolahragaan tersebut adalah sebagai berikut:

Olahraga Pendidikan

· Identifikasi Antropometri, Tes Kemampuan Fisik dan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh Guru PJOK yang telah mengikuti Training of Trainer Pemanduan Bakat dan TKPN dengan kriteria 1 Guru PJOK mengambil data Peserta Didik dengan mengikuti instrumen tes yang diberikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tes. Identifikasi antropometri melakukan tes fisik dilakukan pada 8 indikator meliputi tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, panjang tungkai, rentang lengan, panjang telapak kaki, panjang telapak tangan dan panjang jengkal. Pelaksanaan tes kemampuan fisik meliputi vertical jump, ruler drop test, hand wall toss test, sprint 20 meter, dan pacer test. Sedangkan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN), merupakan serangkaian tes yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran pelajar di Indonesia dari usia 9 tahun sampai 18 tahun. TKPN terdiri dari 5 item tes, yaitu:

a) Pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT), dengan mengukur tinggi badan dan berat badan;
b) V-Sit and Reach;
c) Sit Up 60 detik;
d) Squat Thrust 30 detik;
e) Tes PACER.

Tujuan Kegiatan tes identifikasi antropometri dan tes fisik adalah untuk menemukan anak yang memiliki kemampuan gerak yang baik namun belum mengikuti/berlatih pada cabang olahraga tertentu dan mengarahkan potensi yang dimiliki anak tersebut untuk mengikuti cabang olahraga tertentu.

Sasaran Kegiatan

a) Kegiatan diikuti oleh Pakar/Akademisi Bidang Tes dan Pengukuran Olahraga, Praktisi Olahraga;
b) Pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh Guru PJOK pada Satuan Pendidikan Dasar, dengan mengikuti instrument tes yang diberikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tes;
c) Peserta didik usia 9 – 13 tahun.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

a) Kegiatan diikuti oleh Pakar/Akademisi Bidang Tes dan Pengukuran Olahraga, Praktisi Olahraga;

b) Pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh Guru PJOK pada Satuan Pendidikan Dasar, dengan mengikuti instrument tes yang diberikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tes;

c) Peserta didik usia 9 – 13 tahun.

· Pelatihan dan Bimtek Senam Kesegaran Jasmani

Tujuan kegiatan pelatihan dan bimtek ini adalah:

a) Bimbingan teknis peningkatan mutu guru PJOK sebagai sarana dan media pembekalan ilmu keolahragaan yang merupakan pondasi untuk dapat menjadi pelatih cabang olahraga unggulan DBON, pelatih/instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ);

b) Guru PJOK juga diharapkan mampu untuk menjadi pelatih/instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dalam upaya untuk menggerakkan dan mengolahragakan peserta didik serta menggelorakan semangat berolahraga masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Bugar;

Melalui kegiatan Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani diharapkan guru PJOK memiliki kompetensi sebagai instruktur SKJ dimana kompetensi tersebut akan sangat mendukung program pemerintah dalam memaksimalkan sosialisasi SKJ sehingga dapat diterima menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya peserta didik di satuan-satuan pendidikan.

Jakarta: Lomba SKJ 2022 Piala Kemenpora Tingkat Nasional tahun 2024 telah sukses digelar. Lomba berlangsung pada 21 s.d 22 Agustus 2024 di Auditorium Wisma Kemenpora.

Dari seluruh rangkaian lomba yang telah berlangsung, terpilih juara Lomba SKJ 2022 tingkat nasional tahun 2024 kategori pelajar SMP dan tingkat jabodetabek untuk kategori pelajar SD.

- Perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah meraih gelar juara 1 Lomba SKJ untuk kategori pelajar SMP dan
- Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jakarta Pusat sebagai juara 1 Lomba SKJ untuk kategori pelajar SD.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	69	70	70	70	80
	Realisasi	65,53	67,62	67,41	77,06	76,23

Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan Amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansi secara berkelanjutan. Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kategori penilaian tersebut, SAKIP Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebesar 76,23. Dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Kendala dalam Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala utama yang menjadi penghambat atas ketercapaian nilai SAKIP adalah terkait dengan Pelaporan Kinerja dimana Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga hanya mendapatkan poin sebesar 7,92 dari poin maksimal sebesar 15. Hal ini terjadi karena penyusunan atas dokumen pelaporan kinerja masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyesuaian atas strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya penyusunan Laporan Kinerja pada setiap triwulannya agar bisa menjelaskan dan menganalisis secara lebih real time terkait dengan proses pencapaian target kinerja pada tahun berjalan sehingga apabila ditemukan suatu hambatan bisa dievaluasi dan diatasi lebih dini. Laporan Kinerja hanya digunakan sebagai 'tradisi tahunan' untuk menggugurkan kewajiban tanpa dimengerti lebih dalam terkait kebermanfaatannya.

Laporan Kinerja juga masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan atas rencana kerja dan targetnya. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga masih mendapatkan nilai B pada bagian penetapan target yang memenuhi kriteria SMART, achievable, dan menantang. Hal ini akan menjadi catatan dan tantangan tersendiri untuk masing-masing UKE II dalam hal perencanaan kinerja. Pelaporan Kinerja, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga juga mendapatkan poin yang rendah pada Perencanaan Kinerja. Dari poin maksimal sebesar 30 poin, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga hanya mendapatkan angka 23,38 poin. Nilai tersebut tergolong rendah dikarenakan beberapa dokumen perencanaan kinerja masih belum dilakukan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Proses perencanaan kinerja juga masih ada beberapa step yang tidak dilakukan secara maksimal yaitu cascading kinerja dari atasan ke staf termasuk dengan target atas indikator kinerja yang masih belum terstruktur dengan baik nomenklatur dan pagu anggarannya. Terdapat juga beberapa dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja yang belum dipublikasikan tepat waktu.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak Lanjut atas Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Atas rekomendasi AKIP tahun 2022, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1	Agar dokumen renstra di reviu secara berkala	Akan dilakukan kembali reviu secara berkala membandingkan renstra kementerian dengan renstra deputi
2	Agar dokumen renstra memuat target tahunan	Belum semua indikator memuat target tahunan
3	Agar rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala	Belum semua rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala
4	Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	Pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punisment
5	Agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala baik bulanan/triwulan/semester
6	Agar laporan kinerja sepenuhnya menyajikan informasi analisis efisiensi sumber daya	Analisis efisiensi sumber daya belum dibuat per indikator
7	Agar dapat dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi	Evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Dalam rangka terselenggaranya Good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka kelancaran tugas-tugas, peningkatan kualitas kinerja, serta pencegahan kendala-kendala yang mungkin terjadi di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diperlukan suatu pengawasan serta evaluasi untuk peningkatan kualitas program di masa yang akan datang, serta melaksanakan salah satu program pembangunan yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan

Pemantapan pelaksanaan program pengembangan di bidang Pembudayaan Olahraga. Penyusunan laporan kinerja ada dua kegiatan yaitu LKj Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan LKj Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	84	85	86	87	75
	Realisasi	72,85	89,07	89,20	73,65	83,45

Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator tersebut antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Dispen SPM merupakan pengurang dari nilai total IKPA tahun 2024.

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
Nilai	100.00	58.51	81.07	100.00	64.00	83.28	94.91	83.45	100%	1.00	82.45
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	8.78	16.21	10.00	6.40	8.33	23.73				
Nilai Aspek	79.26		82.09				94.91				

Berdasarkan capaian di atas, penilaian atas IKPA tidak mencapai target secara maksimal dimana target nilai 88 namun sampai dengan 31 Desember 2024 hanya memperoleh nilai 83,45. Terdapat perbedaan target antara perjanjian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dengan perjanjian kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga di mana pada perjanjian kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melakukan revisi target nilai dari 88 ke 75. Hal ini terjadi karena adanya evaluasi secara internal terkait dengan kondisi ketercapaian IKPA pada bulan September tahun 2024 namun sayangnya perubahan tersebut tidak diakomodir pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Untuk nilai kinerja pada sasaran program ini sebesar 94,77%. Pencapaian target tidak dapat terpenuhi disebabkan oleh beberapa faktor. Pada gambar di atas bisa terlihat beberapa indikator yang dinilai rendah.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah rincian faktor berdasarkan masing-masing indikator:

a. Deviasi Halaman III DIPA

- Adanya kesalahan dalam memperkirakan jumlah dana yang akan diambil setiap bulannya;
- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana.

b. Penyerapan Anggaran

- Realisasi penyerapan anggaran berbeda jauh dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan target 15% pada Triwulan I, 50% pada Triwulan II/Semester I, 70% pada Triwulan III, dan 90% pada Triwulan IV/Semester II;
- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
- Adanya pagu blokir.

c. Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan

- Keterlambatan pengumpulan dokumen dari pihak ke-3;
- Keterlambatan penyusunan dokumen kontrak dan pendaftaran kontrak;
- Keterlambatan pengajuan dokumen pengusulan pencairan untuk dikoreksi terlebih dahulu oleh PPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pengelolaan UP dan TUP

- Keterlambatan penyusunan dokumen pencairan;
- Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan untuk dikoreksi terlebih dahulu oleh PPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Dispensasi SPM

- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
- Adanya DIPA pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas pada akhir periode anggaran sehingga pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah masa pengiriman SPM Non-LS selesai (18 Desember 2024).

Dari perincian atas permasalahan di atas maka akan dilakukan langkah untuk antisipasi dan peningkatan nilai IKPA pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Deviasi Halaman III DIPA

- Peningkatan akurasi perkiraan penarikan dana yang akan diambil dengan lebih memperhatikan perkiraan jadwal pelaksanaan dan antisipasi atas perubahan jadwal tersebut.

b. Penyerapan Anggaran

- Mapping jadwal kegiatan dan antisipasi berubahnya jadwal kegiatan;

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan dimulai sejak awal tahun;
- Segera melengkapi kebutuhan data dukung untuk pengusulan pembukaan buka blokir di awal tahun 2024 sehingga kegiatan yang terblokir anggarannya bisa segera dilaksanakan

c. Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan

- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk penyusunan kontrak dan pencairan pembayaran kontrak melalui SPP.

d. Pengelolaan UP dan TUP

- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan.

e. Dispensasi SPM

- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan;
- Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- Antisipasi kegiatan tidak dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran.

Penyusunan dan Penajaman Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-K/L 2023 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan dan mengukur. Tingkat keberhasilan juga menyusun rencana anggaran program satu tahun berjalan dan satu tahun kedepan, termasuk sasaran, output, daya serap anggaran. Dalam layanan penyusunan dan penajaman rencana program dan anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki beberapa kegiatan diantaranya:

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Pelayanan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran untuk TA 2025 yang dilaksanakan secara hybrid meeting menghasilkan TOR dan RAB yang telah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program tahun 2024 yang mencapai realisasi 100% dengan bukti TOR dan RAB yang telah selesai disusun;
- Diadakannya kegiatan sosialisasi dan penajaman penyusunan Renstra Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga TA 2025-2029 bersama dengan Bappenas;
- Penelaahan Revisi yang dilakukan berkaitan dengan program/anggaran tahun 2024 yang telah mencapai Revisi DIPA 12 kali dan Revisi POK sebanyak 12 kali.

Penatausahaan Laporan Keuangan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Salah satu kewajiban pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran adalah melaporkan penggunaan anggaran pada satu tahun anggaran yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi. Penatausahaan laporan keuangan meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan untuk periode triwulanan. Laporan keuangan yang disusun diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dapat dipahami, andal dan bertanggung jawab. Penyusunan laporan keuangan dilakukan pada setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Target yang diharapkan adalah 2 laporan yakni laporan satu semester dan laporan tahunan. Realisasi yang tercapai yakni 100%.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

5. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	87,5	88	89	90	91
	Realisasi	N/A	86,53	87,80	96,85	76,50

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (proving) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (improving) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker).

Nilai atas Kinerja Anggaran tersedia dan bisa diakses pada website E-SMART DJA. Nilai atas Kinerja Anggaran terdiri dari 2 komponen penilaian utama yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki 2 komponen penilaian, yaitu efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran. Efektivitas perencanaan anggaran merupakan nilai atas capaian rincian output sedangkan efisiensi perencanaan adalah nilai atas pelaksanaan dengan bobot nilai 10% dan efisiensi atas penggunaan SBK (Satuan Biaya Keluaran) dengan bobot nilai 15%. Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapatkan dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang ada pada website OM SPAN.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
69,55	92,73	0,00	0,00

Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapatkan dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang ada pada website OM SPAN.

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 76,48 dari target sebesar 91. Perincian atas penilaian tersebut dirincikan pada gambar di bawah ini:

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
69,55	83,45	76,50

Kendala dalam Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah mayoritas jadwal kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi output menumpuk di akhir tahun. Hal ini terjadi karena adanya kendala pada bagian anggaran seperti masih adanya pagu blokir akibat kurangnya data dukung seperti TOR dan Juknis Kegiatan/Bantuan, pergantian pejabat pengelola keuangan, dan adanya jadwal kegiatan yang diundur/terhambat akibat perubahan program dan kebijakan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran adalah adanya pemotongan pagu untuk kepentingan menutup kekurangan Belanja Pegawai pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga akibat kenaikan tunjangan kinerja pegawai sehingga banyak sekali kegiatan yang dibatalkan seperti pelaksanaan festival olahraga dan penyerahan bantuan atau fasilitasi olahraga kepada masyarakat. Selain karena pemotongan pagu, pada tanggal 9 November 2024 telah keluar Surat Edaran Menteri Keuangan terkait dengan kewajiban self-blocking akun perjalanan dinas tahun 2024 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan.

Selain karena pemotongan pagu, pada tanggal 9 November 2024 telah keluar Surat Edaran Menteri Keuangan terkait dengan kewajiban self-blocking akun perjalanan dinas tahun 2024 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak Lanjut atas Kendala Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Ujung tombak dari pelaksanaan kinerja anggaran adalah akurasi dan kematangan dalam perencanaan. Oleh karena itu, seluruh UKE II diharapkan bisa merencanakan, menjadwalkan, mengantisipasi pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga memuat komponen penilaian atas penerapan SBK (Standar Biaya Keluaran) sehingga diharapkan UKE II bisa mengajukan penyusunan SBK untuk kegiatan yang berulang setiap tahun.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

6. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	84	86	88	90	92
	Realisasi	N/A	92,28	90,49	86,32	89,04

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong 92 kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Metode

Pelaksanaan SKM menggunakan aplikasi e-skm dan manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu :

- **Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **Biaya/tarif**: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- **Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- **Perilaku pelaksana**: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu 10 bulan 12 hari. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2024
2.	Pengumpulan Data	Januari-November 2024
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2024
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2024

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan SKM Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan data target sasaran program/kegiatan tahun 2024. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 41.890 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 1.261 orang hingga tanggal 12 November 2024.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Tabel 2. Tabel Krejcie and Morgan untuk menentukan Jumlah Sampel SKM

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun sebaran sampel tiap unit Eselon II pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang adalah sebagai berikut:

Unit	Populasi	Sampel	Responden	%
Sekretaris Deputi	240	148	163	6.18%
Asdep Olahraga Pendidikan	20.400	384	821	31.15%
Asdep Olahraga Masyarakat	16.750	375	1171	44.42%
Asdep Olahraga Disabilitas	4.500	354	481	18.25%
Total Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	**41.890**	**1.261**	**2.636**	**10%**

Tabel 3. Jumlah Responden SKM dan Persentasenya

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 2636 orang responden, dengan rincian Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1555 responden (58.99%), sedangkan responden perempuan sebanyak 1081 orang (41.01%)

#	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	LAKI-LAKI	1555	58.99%
2	PEREMPUAN	1081	41.01%
Total		**2636**	**100%**

Tabel 4. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Jenis Kelamin

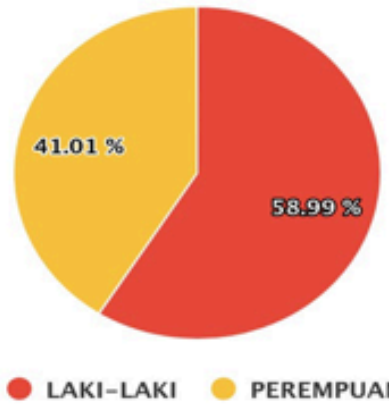

Gambar 1. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Jenis Kelamin

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan usia, sebagian besar responden adalah berusia 45 tahun ke atas sebanyak 894 orang (33.92%), disusul dengan responden usia 35-44 tahun sebanyak 710 orang (26.93%), usia 25-34 tahun sebanyak 680 orang (25.8%) dan 24 tahun kebawah sebanyak 352 orang (13.35%)

#	Range Usia	Responden	Persentase
1	24 tahun ke bawah	352	13.35%
2	25-34 tahun	680	25.8%
3	35-44 tahun	710	26.93%
4	45 tahun ke atas	894	33.92%
Total		**2636**	**100%**

Tabel 5. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Usia

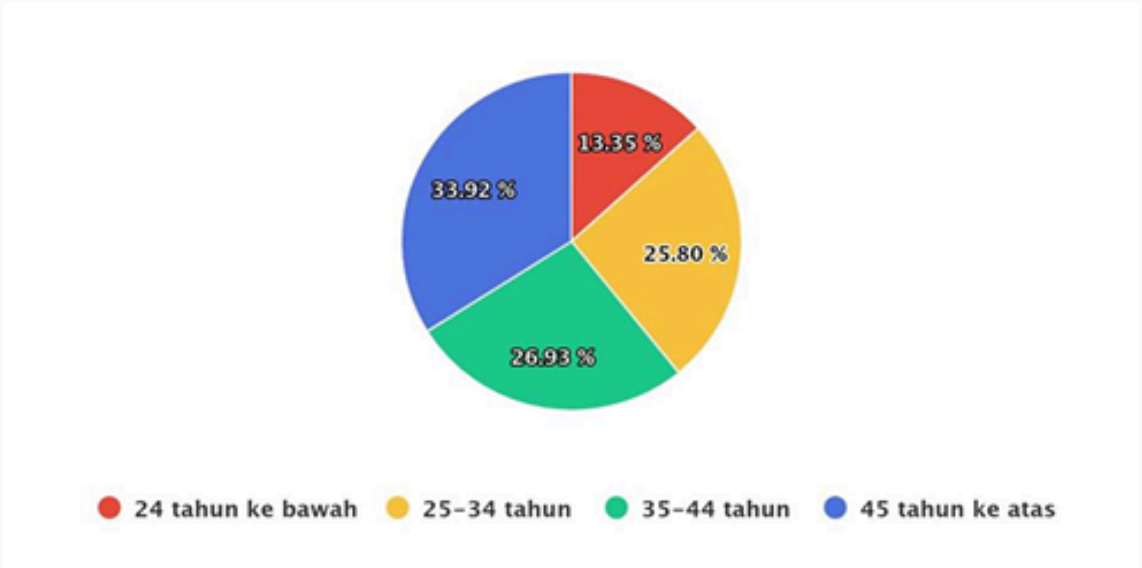

Gambar 2. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Usia

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan range pendidikan, responden terbanyak berpendidikan terakhir S1 berjumlah 1516 orang (57.51%), selanjutnya adalah responden dengan pendidikan terakhir SLTA ke bawah sejumlah 656 orang (24.89%), S2 sebanyak 318 orang (12.06%), lainnya sebanyak 128 orang (4.86%) dan yang paling sedikit adalah S3 sebanyak 18 orang (0.68%).

#	Range Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA ke bawah	656	24.89%
2	S1	1516	57.51%
3	S2	318	12.06%
4	S3	18	0.68%
5	Lainnya	128	4.86%
Total		2636	100%

Tabel 6. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Pendidikan

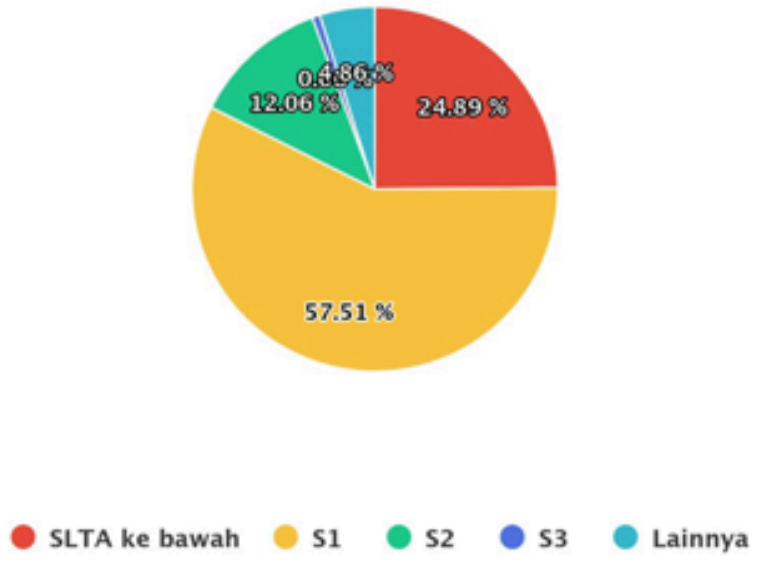

Gambar 3. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Pendidikan

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Data menunjukkan sebagian besar responden adalah non pegawai Kemenpora sebesar 94.84% dan pegawai Kemenpora 5.16%.

#	kategori Responden	Responden	Persentase
1	Pegawai Kemenpora	136	5.16%
2	Non Pegawai Kemenpora	2500	94.84%
Total		2636	100%

Tabel 7. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Kategori Asal Organisasi

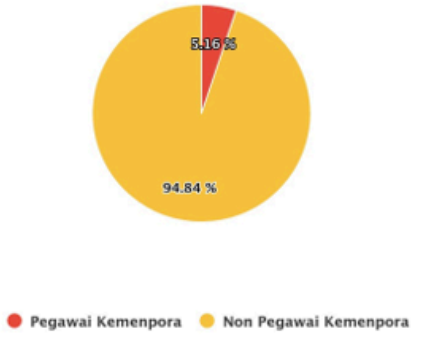

Gambar 4. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Kategori Asal Organisasi

#	Pekerjaan	Responden	Persentase
1	PNS/TNI/POLRI	1246	47.27%
2	PEGAWAI SWASTA	200	7.59%
3	WIRASWASTA	133	5.05%
4	PELAJAR/MAHASISWA	276	10.47%
5	LAINNYA	781	29.63%
Total		2636	100%

Tabel 8. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Pekerjaan

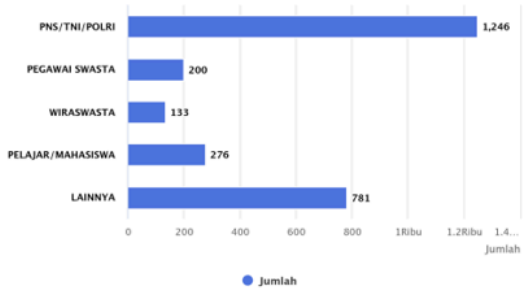

Gambar 5. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, data hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (47.27%) berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI, disusul kategori lainnya (29.63%), pelajar/mahasiswa (10.47%), pegawai swasta (7.59%), dan wiraswasta (5.05%).

Data nilai IKM tiap unsur adalah sebagai berikut:

#	Unsur SKM	Nilai IKM	Nilai IKM (DiKonversi)	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	3.48	86.99	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.47	86.64	B	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3.41	85.35	B	Baik
4	Biaya/Tarif	3.75	93.84	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3.46	86.49	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.54	88.4	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.58	89.56	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	3.88	97.07	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.5	87.57	B	Baik

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

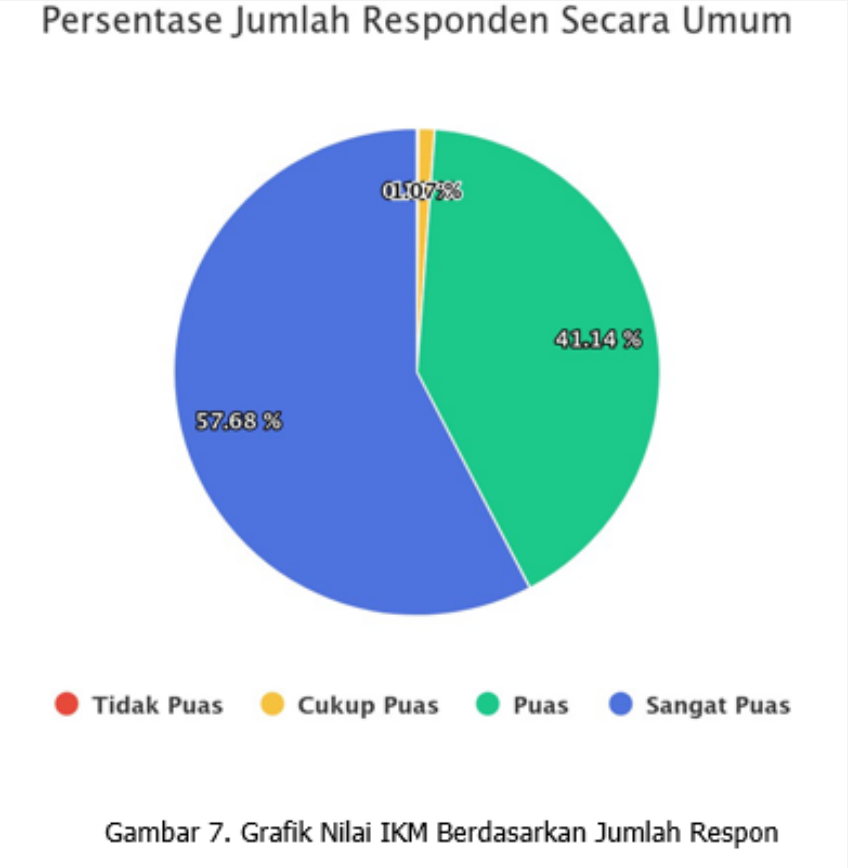

Gambar 7. Grafik Nilai IKM Berdasarkan Jumlah Respon

Kendala dalam SKM pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah Tidak semua responden terbiasa mengisi formulir secara online sehingga ada responden yang lebih mudah mengisi dengan form manual, Beberapa kali terjadi gangguan (error) dalam aplikasi e-skm, Adanya responden yang kurang memahami pertanyaan dalam kuesioner sehingga harus dijelaskan lebih detail oleh petugas, dan Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.41 Selanjutnya produk, spesifikasi dan jenis layanan mendapatkan nilai 3.46 adalah nilai terendah kedua. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan menjadi unsur terendah ketiga dengan nilai 3.47.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

· Waktu penyelesaian pelayanan dinilai baik, yang juga berarti masih dirasakan kurang cepat oleh penerima layanan (bukan sangat baik).

· Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan dinilai sesuai (belum sangat sesuai) dengan harapan responden.

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak Lanjut atas Kendala SKM pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Evaluasi dengan melihat hasil IKM dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Tim yang bertanggung jawab terhadap SKM menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan selama 12 bulan (satu tahun ke depan).

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Memberikan masukan kepada unit-unit pelaksana untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan	√				Tim Humas
		Melakukan monitoring dan evaluasi agar unit-unit pelaksana tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan		√	√	√	Unit Eselon II terkait
2	Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan	Mendata ketersediaan dan kecocokan Standar Pelayanan dan SOP dengan jenis Pelayanan yang diberikan	√				Tim SDM dan Organisasi
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur dan Layanan	Melakukan review dan penyusunan SP dan SOP Pelayanan	√				Tim SDM dan Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi Pemberian layanan sesuai SP dan SOP		√	√	√	Tim SDM dan Organisasi

Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang SANGAT BAIK dengan nilai SKM 89,1. Nilai SKM ini menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya (2023).

III.2 CAPAIAN KINERJA

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

7. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	70%	70%	70%	70%	80%
	Realisasi	100%	50%	100%	100%	81,8%

Pada Tahun Anggaran 2020-2022 terdapat 11 rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Adapun rekomendasi yang disarankan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terdapat pada lampiran Laporan Kinerja ini. Selama tahun 2020-2022, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah menindaklanjuti 9 dari 11 rekomendasi BPK. Adapun rekomendasi BPK adalah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku KPA menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan pengujian pertanggungjawaban atas belanja Perjalanan Dinas dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Tindaklanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada nota dinas teguran dari KPA Satker Bidang Pembudayaan Olahraga kepada PPK dikarenakan perubahan SOTK yang terjadi di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang disertai perubahan pejabat keuangan, dalam hal ini KPA dan PPK. Agar temuan pemeriksaan tidak berulang lagi, maka:

1.KPA akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja;

2.PPSPM, PPK, BP, dan BPP agar mempedomani ketentuan yang berlaku dan lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban belanja.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, anggaran yang terserap sebesar **Rp114.735.414.491 atau 99,31%**. Serapan anggaran Deputi Pembudayaan Olahraga pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023. Pagu Rp115.529.232.000 merupakan pagu sesudah pemotongan Rp5.000.000.000 yang digunakan untuk tunjangan kinerja dan Rp2.097.000.000 berupa pagu blokir atas penghematan perjalanan dinas berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 314/PB/2024 tanggal 7 November 2024. Walaupun terdapat pagu blokir atas akun perjalanan dinas di tahun 2024, UKE II masih bisa melaksanakan dengan maksimal.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
	JUMLAH KESELURUHAN	**115,529,232,000**	**114,735,414,491**	**99,31%**
	Program Keolahragaan			
1	Olahraga Penyandang Disabilitas	16,770,842,000	16,619,918,748	99.10
2	Olahraga Pendidikan	39,044,658,000	38,830,575,390	99.45
3	Olahraga Masyarakat	54,713,732,000	54,290,884,270	99.23
	Program Dukungan Manajemen			
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	4,994,036,083	99.88

III.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output sama/lebih besar, atau persentase input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan.

- **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian bagi suatu Kementerian. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan untuk menggunakan anggaran secara optimal sehingga menghasilkan output yang maksimal dengan anggaran (input) yang diberikan. Nilai efisiensi anggaran dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Adapun rumusan perhitungan efisiensi anggaran yang digunakan yaitu:

$$efisiensi = \frac{input}{ouput} = \frac{\%RA}{\%\ CRO}$$

Efisiensi	Kategori	Keterangan
Efisiensi > 1	Kurang Efisien	belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia
Efisiensi < 1	Efisien	besarnya capaian kinerja melebihi dari anggaran yang dialokasikan

III.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%RA)	Realisasi Kinerja (%CRO)	E=%RA/ %CRO	Kategori
1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	96.081.325.000	99	65,75	1,5057	Tidak Efisien
2	Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	14.447.907.000	99,90	65,33	1,5291	Tidak Efisien
3	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	482.049.000	99,65	95,29	1,0458	Tidak Efisien
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	482.049.000	99,91	94,83	1,0536	Tidak Efisien
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	106.595.000	99,96	84,04	1,1844	Tidak Efisien
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	3.737.340.000	99,95	96,85	1,0320	Tidak Efisien
7	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	483.049.000	99,91	102,25	0,9771	Efisien

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa hanya ada 1 Indikator Kinerja yang mendapatkan predikat efisien yaitu Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. 2 Indikator Kinerja Utama bahkan tidak bisa mendapatkan predikat efisien. Efisien atau tidaknya suatu kegiatan bisa dilihat dari apakah anggaran yang dicairkan bisa lebih rendah dariapda impact yang dihasilkannya. Gap anggaran dengan realisasi kinerja atas 2 Indikator Kinerja Utama sangatlah besar.

III.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Hal ini tentunya harus dievaluasi lebih lanjut oleh seluruh bagian Deputi Bidang Pembudayaan olahraga apakah selama ini kebijakan-kebijakan dan langkah yang ditempuh sudah bisa mendukung untuk peningkatan partisipasi berolahraga dan kebugaran masyarakat agar tidak terjadi money waste yang berarti. Deputi Bidang Pembudayaan bisa melakukan pengkajian ulang atas kegiatan dan kebijakan yang telah dicanangkan sebelumnya serta mengkaji ulang atas penetapan target pada RPJMN dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 agar lebih masuk akal dalam pengukurannya serta bisa dipertanggungjawabkan penghitungannya. Perlu diketahui juga bahwa penghitungan atas nilai efisiensi di atas belum bisa dikatakan 100% akurat dikarenakan antara Perjanjian Kinerja dengan Rincian Kertas Kerja Anggaran masih terdapat perbedaan nomenklatur dan tidak sinkronnya penggolongan Rincian Output beserta pagunya dengan masing-masing Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja sehingga ada beberapa Rincian Output dan pagunya dialokasikan untuk lebih dari 1 indikator kinerja.

- **Efisiensi Sumber Daya Manusia Aparatur**

Tahun	% Capaian Kinerja	Jumlah SDM
2022	120%	92 orang
2023	129,80%	96 orang
2024	93,99%	111 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan kinerja antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun tersebut juga ada kenaikan jumlah pegawai sebanyak 4orang. Namun pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah pegawai sebanyak 15 orang namun terjadi penurunan capaian kinerja dari 129,80% menjadi 93,99%. Kesimpulannya, kenaikan jumlah SDM tidak berpengaruh secara konstan terhadap tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Kondisi sumber daya manusia aparatur/pegawai di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

III.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

a.Sebaran pegawai masih belum merata, masih terdapat tim kerja yang kekurangan pegawai dan tim kerja lain yang terlalu banyak pegawai. Hal ini mengakibatkan timpangnya beban kerja yang dialami oleh pegawai. Untuk itu diperlukan penyebaran pegawai secara merata sesuai kompetensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing tim kerja;
b.Diperlukan pembinaan dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan sesuai tugas fungsi dan kemampuan setiap pegawai;
c.Banyak pegawai yang telah melakukan uji kompetensi dan lulus pengangkatan pegawai fungsional namun untuk plotting/penempatan pejabat fungsional masih diperlukan kajian ulang dengan lebih memperhatikan kondisi sebenarnya pada masing-masing UKE II;
d.Diperlukannya evaluasi berkala atas kompetensi setiap pegawai agar bisa melaksanakan tugas fungsi bagiannya secara maksimal;
e.Diperlukan adanya reward and punishment sehingga SDM menjadi lebih serius dan peduli dengan tugas fungsinya di organisasi.

III.5 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang ada serta didukung pula oleh anggaran sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan. Program/Kegiatan penunjang keberhasilan tiap-tiap sasaran sesuai Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IDENTIFIKASI KEGIATAN PENDUKUNG
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Berolahraga dalam Seminggu Terakhir	40%	1. Kegiatan keolahragaan bidang pendidikan seperti; Festival Olahraga Pendidikan, Festival Usia Dini, Festival Sepak Bola U-12 2. Kegiatan keolahragaan di bidang Olahraga Masyarakat seperti; TARKAM, HAORNAS, FORTRADNAS, dan Industri Olahraga 3. Kegiatan keolahragaan di bidang olahraga penyandang disabilitas seperti; Festival Olahraga Disabilitas
		Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%	
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional,	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	1. Rapat persiapan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 2. Rapat dan koordinasi terkait dengan perjanjian kinerja dan indikator kinerja 3. Penyusunan pohon kinerja sebagai *Cascading* PK Deputi ke PK UKE II

III.5 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

	dan melayani	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88	1. Rapat telaah revisi anggaran terkait perubahan pagu, *refocusing* tunjangan kinerja, dan pemblokiran akun perjalanan dinas; 2. Koordinasi dengan UKE II terkait Rencana Penarikan Dana; 3. Koordinasi dengan UKE II terkait dengan pencairan anggaran melalui SPP dan SPM; 4. Koordinasi dengan UKE II terkait pengumpulan data capaian output setiap bulannya; 5. Rapat percepatan penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan.
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	1. Rapat telaah revisi anggaran terkait perubahan pagu, *refocusing* tunjangan kinerja, dan pemblokiran akun perjalanan dinas; 2. Koordinasi dengan UKE II terkait Rencana Penarikan Dana; 3. Koordinasi dengan UKE II terkait dengan pencairan anggaran melalui SPP dan SPM; 4. Koordinasi dengan UKE II terkait pengumpulan data capaian output setiap bulannya; 5. Rapat percepatan penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	1. Monitoring dan evaluasi kegiatan setiap UKE II; 2. Penyebaran link survey pada tiap kegiatan; 3. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan.
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	1. Rapat Koordinasi hal Penyelesaian Temuan LHP BPK; 2. Penyetoran pengembalian belanja Tahun 2020-2025.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 disusun sebagai wujud nyata komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya kepada publik dan untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran dan tujuan. Secara umum, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah berupaya dengan sungguh – sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan segala sumber daya yang ada. Sasaran strategis beserta masing-masing indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen penuh dan dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan di tahun 2024.

IV.2 KENDALA DAN SARAN

Pada tahun 2024 terdapat 5 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Perincian atas indikator yang tidak tercapai adalah sebagai berikut: Dari perincian di atas, untuk meningkatkan kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kiranya perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut: pengukuran kinerja pada setiap tahunnya; berbasis outcome;

- Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berlaku sebagai acuan dalam
- Melakukan review/evaluasi, perbaikan, dan inovasi sistem kerja dan program kegiatan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja, terutama kinerja yang belum tercapai indikatornya dan mulai melakukan transisi menuju target kinerja
- Merancang dan membangun sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja beserta panduan/manualnya sehingga dapat menghasilkan informasi kinerja yang andal dan responsif terhadap kebutuhan data kinerja;
- Mengakomodasi rencana aksi yang tercantum pada DBON ke dalam Rincian Output (RO) dan Renja K/L;
- Menyusun rumusan kebijakan yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sampai level daerah (advokasi ke daerah);
- Memaksimalkan implementasi penilaian mandiri SPIP;
- Melakukan Sosialisasi Manajemen Risiko ke seluruh unit dan melakukan mitigasi risiko.

Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi
Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.
Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.	Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

PERJANJIAN KINERJA 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	1.1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	40%
		1.2 Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		2.2 Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91
		2.4 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%
		2.5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92

Program	Anggaran
1. Pengembangan Olahraga Pendidikan	Rp 42.208.958.000
2. Pengembangan Olahraga Masyarakat	Rp 57.949.432.000
3. Pengembangan Olahraga Disabilitas	Rp 17.467.842.000
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp 5.000.000.000
Jumlah	**Rp 122.626.232.000**

Jakarta, Januari 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

IKPA

- IKPA 2024 (Triwulan 1)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	33.60	78.40	100%	0.00	78.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	8.40				
					Nilai Aspek	83.34		100.00				33.60				

- IKPA 2024 (Triwulan 2)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	60.86	73.48	100.00	100.00	91.65	90.70	85.66	100%	0.00	85.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.13	14.70	10.00	10.00	9.17	22.67				
					Nilai Aspek	80.43		91.28				90.70				

IKPA

- IKPA 2024 (Triwulan 3)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	58.05	74.79	100.00	56.25	71.65	96.10	80.48	100%	0.00	80.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.71	14.96	10.00	5.63	7.17	24.03				
					Nilai Aspek	79.03		75.67				96.10				

- IKPA 2024 (Triwulan 4)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	58.51	81.07	100.00	64.00	83.28	94.91	83.45	100%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.78	16.21	10.00	6.40	8.33	23.73				
					Nilai Aspek	79.26		82.09				94.91				

DETAIL CAPAIAN OUTPUT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	01	25	800.00	32.00	0.00	22.40
2	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	02	25	900.00	36.00	0.00	25.20
3	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	03	25	1,200.00	48.00	0.00	33.60
4	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	04	25	1,682.95	67.32	100.00	77.12
5	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	05	25	1,814.78	72.59	100.00	80.81
6	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	06	25	2,167.84	86.71	100.00	90.70
7	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	07	25	2,034.06	81.36	100.00	86.95
8	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	08	25	2,366.43	94.66	100.00	96.26
9	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	09	25	2,360.86	94.43	100.00	96.10
10	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	10	25	2,257.73	90.31	100.00	93.22
11	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	11	25	2,230.50	89.22	100.00	92.45
12	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	12	25	2,318.20	92.73	100.00	94.91

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BPK

K 2021

1	Pertanggungjawaban Bukti Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belum Tertib	1	-	BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar: a.Menginstruksikan Sesmenpora untuk membuat SOP terkait ketentuan pertanggunggjawaban perjadin di lingkungan Kemenpora.	1	-	PTL Semester II 2022 Memorandum Menpora tgl 10 Agustus 2022 nomor :PW.06.01/8.10.33/MENPORA/VII/2022 hal tindak lanjuthasil pemeriksaan tentang Instruksi kepada Sesmenpora untuk membuat SOP terkait ketentuan pertanggungjawaban perjadin di lingkungan Kemenpora	0		1		0		0		Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, karena belum ada SOP terkait ketentuan pertanggunggjawaban perjadin di lingkungan Kemenpora	
				BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar: b.Memerintahkan masing-masing KPA untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadin dalam negeri.	1	-	PTL Semester II 2022 Memorandum Menpora tgl 10 Agustus 2022 nomor :PW.06.01/8.10.33/MENPORA/VII/2022 hal tindak lanjuthasil pemeriksaan tentang Instruksi kepada masing-masing KPA untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadin dalam negeri	1		0		0		0		Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi	
				BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar: c.Menginstruksikan masing-masing KPA untuk memerintahkan PPK di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku.	1	-	PTL Semester II 2022 Memorandum Menpora tgl 10 Agustus 2022 nomor :PW.06.01/8.10.33/MENPORA/VII/2022 hal tindak lanjuthasil pemeriksaan tentang instruksi kepada masing-masing KPA untuk memerintahkan PPK di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku	0		1		0		0		Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, karena KPA belum memerintahkan masing-masing PPK melakukan pengujian belanja perjadin	

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BPK

				BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar: c.Menginstruksikan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga untuk: 1)Memerintahkan PPK Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO agar: a)Menarik kelebihan pembayaran pekerjaan penyiapan konsumsi pelatih SKO kepada penyedia sebesar Rp60.160.000 dan menyetorkan ke kas negara; b)Menarik kelebihan pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan Cabang Olahraga Angkat Besi sebesar Rp87.009.091 dan menyetorkan ke kas negara; c)Menarik kelebihan pembayaran akomodasi dan konsumsi atlet dan pelatih SKODI kepada penyedia sebesar Rp37.706.500 dan menyetorkan ke kas negara. 2)Memerintahkan BPP Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO agar: a)Menyetorkan kelebihan pemotongan PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp18.965.820 atas belanja sewa kendaraan SKODI; b)Mempertanggungjawabkan sisa	1	IDR233,841,411	PTL SEMESTER II 2023 : a. Bukti Setor SSBP PT Global Bisnis Adi Satria NTPN No. 453AE6U8ELODCLBL tanggal 01 November 2023 sebesar Rp6.132.000,00. b. Bukti Setor SSBP PT Global Bisnis Adi Satria NTPN No. 03D4D6U8ELP90081 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp6.132.000,00.	1	233,841,411.00	0	-	0	-	0	-	Belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat nilai yang belum disetor sebesar Rp138.000.000,00.	234,075,371.00
UK 2022																		
1	Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan			BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar : d.Menginstruksikan Deputi Pembudayaan Olahraga untuk: 1)Melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadin dalam negeri; 2)Memerintahkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku; 3)Memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp72.425.000 (Rp83.125.000-Rp10.700.000) dan menyetorkan ke kas negara.	1	IDR 72,425,000	PTL SEMESTER II 2023 : a. Memorandum Menteri Pemuda Olahraga kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor PW.06.01/7.13.4/MENPORA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 untuk : 1) melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadin dalam negeri; 2) memerintahkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku; 3) memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp72.425.000 (Rp83.125.000 - Rp10.700.000) dan menyetorkan ke kas negara. b. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran perjadin NTPN No. DE3DE1JNFLUSN9E1 tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp42.250.000,00. c. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran perjadin NTPN No. 4490A7QLUFVJEDSI tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp2.875.000,00. d. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran perjadin NTPN No. 70D9D61QUQT6A6U2 tanggal 4		IDR 72,425,000.00	1						Belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat instruksi dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kepada PPK dan BPP agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku.	
2	Penganggaran, Pelaksanaan Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan Pelaporan Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi Belum Memadai			BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar: b.Menginstruksikan Deputi Pembudayaan Olahraga untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Asdep Sentra dan SKO atas ketidakcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi;	1	IDR -	PTL SEMESTER II 2023 : a. Memorandum Menteri Pemuda Olahraga kepada Deputi Pembudayaan Olahraga Nomor PW.06.01/7.13.4/MENPORA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Asdep Sentra dan SKO atas ketidakcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi. b. Nota dinas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kepada Asdep Pembinaan Sentra dan SKO Nomor PW.06.01/7.28.1/D-III/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal tegaran atas ketidakcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi.	1						Telah sesuai rekomendasi.	

BA EVALUASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Unit Organisasi Eselon I	:	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Unit Organisasi Eselon II	:	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Kode Kegiatan	:	1720
Nama Kegiatan	:	Bidang Pembudayaan Olahraga
Triwulan	:	IV
Tahun	:	2024

A	Catatan Evaluasi
1.	Target kinerja 2024 pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga **berdasarkan aplikasi e-Monev BAPPENAS** sudah terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
2.	Nilai Kinerja Organisasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan Aplikasi E-kinerja Kemenpora per 9 Januari 2025 adalah 97,25 %
B	Rekomendasi
1.	Untuk pagu anggaran tahun 2025 agar dapat disesuaikan pada aplikasi SAKTI.
2.	Terkait Capaian Kinerja agar dapat dibuatkan jadwal per triwulan (Rencana Penarikan Dana), sehingga capaian kinerja dapat terinput sesuai jadwal dan tidak menumpuk di akhir tahun dan revisi anggaran internal dan ekternal dapat efektif dan efisiensi sesuai kebutuhan unit.
3.	Peningkatan koordinasi pihak internal dan eksternal berkaitan dengan Keuangan, RB, SPIP dan SDM.

Jakarta, 9 Januari 2025

Operator pada Sekretariat Deouti Bidang Pembudayaan Olahraga	Evaluator pada Biro Perencanaan dan Keuangan
Chiyasa Nur Fitriani NIP. 200008182022012004	Devia Ladiana NIP. 198603032023212035

Mengetahui,
Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Aris Subiyono, SH
NIP. 196504271991031002

SURAT MENTERI KEUANGAN PERSETUJUAAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENGHEMATAN PERJALANAN DINAS

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-108/MK.5/2024 18 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Anggaran Penghematan Belanja Perjalanan Dinas

Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pemuda dan Olahraga RI nomor T.PR.03.01/11.28.1/MENPORA/XI/2024 tanggal 28 November 2024 hal Permohonan Dispensasi Buka Blokir dan Revisi Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2025 dan Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor PR.03.01/12.16.61/SET/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Penjelasan atas Usulan Dispensasi Buka Blokir dan Revisi Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketercapaian target sasaran program prioritas serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dukungan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan nasional, dengan ini **disetujui:**
   a. penggunaan sisa pagu belanja perjalanan dinas yang telah dilakukan penghematan sebesar Rp7.349.390.000,00.
   b. pencantuman penghematan belanja perjalanan dinas pada Satker UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (499962) sebesar Rp7.356.214.000,00.
2. Berdasarkan angka 1 dimaksud, maka terhadap penghematan sisa anggaran belanja perjalanan dinas pada DIPA Satker lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2024 yang telah dilakukan pencantuman dalam DIPA dapat dilakukan penyesuaian angka penghematan belanja perjalanan dinas sebagaimana terlampir.
3. Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga agar melakukan perubahan besaran penghematan sebagaimana pada angka 2 dimaksud melalui mekanisme revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan mitra kerja masing-masing, paling lambat tanggal 20 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

SURAT MENTERI KEUANGAN PERSETUJUAAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENGHEMATAN PERJALANAN DINAS

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-108/MK.5/2024
Tanggal : 18 Desember 2024

Daftar Penghematan Sisa Pagu Belanja Perjalanan Dinas
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

No	Kode Unit	Kode Satker	Nama Satker	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	01	418135	Kesekretariatan Kemenpora	3.450.000.000	1.020.262.000
2.	01	418137	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora	4.411.176.000	2.491.524.000
3.	01	418138	Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora	6.045.000.000	6.045.000.000
4.	01	418139	Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora	5.097.000.000	2.097.000.000
5.	01	418140	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora	15.073.791.000	15.073.791.000
6.	01	499962	UPT Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan	-	7.356.214.000
Jumlah Penghematan				**34.076.967.000**	**34.083.791.000**

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

ND PEMOTONGAN TUKIN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

NOTA DINAS

Nomor : BO / 8.27.1 / D-III.1 / VIII /2024

Yth	: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dari	: Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Hal	: Optimalisasi Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Untuk Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pemuda Olahraga
Tanggal	: 27 Agustus 2024
Lampiran	: 3 (tiga) lembar

Berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 21 Agustus 2024 dan rapat internal pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tanggal 26 Agustus 2024, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendapat alokasi optimalisasi / penghematan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) untuk keperluan pembayaran kenaikan tunjangan kinerja Kemenpora bulan September s.d. Desember 2024. Maka sesuai kesepakatan, mekanisme pembagian masing-masing Eselon II pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut :

a. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat : Rp.2.258.700.000,-
b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan : Rp.2.241.300.000,-
c. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas : Rp. 500.000.000,-

Terlampir kami sampaikan Rincian Anggaran Biaya pada masing-masing Eselon II Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Aris Subiyono

Tembusan :

1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
2. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat;
3. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan;
4. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas.

RENCANA AKSI 2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Target		Rencana Aksi	Data Pendukung	Keterangan
			Indikator Keberhasilan	Waktu Penyelesaian			
Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pengisian data pengadaan dan diumumkan pada Website SIRUP	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan pengumuman pada SIRUP terkait paket penyedia, non penyedia, maupun swakelola yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian persentase pengumuman pengisian	Website SIRUP
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90	Tercapainya target nilai atas kinerja pelaksanaan anggaran	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan analisis dan perbaikan kinerja lebih lanjut di 8 indikator penilaian terutama pada bagian yang memiliki nilai rendah seperti deviasi halaman DIPA III, pelaksanaan dan pelunasan kontrak dan UP/TUP	Rincian atas penilaian IKPA per bulan	Website MONEVPA DJPb
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	Tercapainya target nilai atas kinerja anggaran	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan perbaikan kinerja anggaran terutama pada kegiatan Prioritas Nasional agar tidak menumpuk di akhir tahun	Rincian atas penilaian kinerja anggaran (NKA)	Website ESMART DJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	Tercapainya target indeks atas kepuasan masyarakat	Januari s.d. Desember 2024	Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan pada Deputi 3 kepada masyarakat Meningkatan efektivitas penilaian SKM pada tiap unit Eselon II di Deputi 3	Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM)	Website E-SKM Kemenpora
	Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75	Tercapainya target rata-rata nilai atas pengawasan kearsipan di UKE II Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Juni-Juli 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait tata kelola kearsipan terutama pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Olahraga Disabilitas	Rincian atas penilaian atas kearsipan di UKE II Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penilaian kearsipan dari bagian kearsipan Sekretariat Kemenpora dan ANRI
	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas penyediaan data	Desember 2024	Melakukan penyampaian penyediaan data kepada UKE II	Informasi kegiatan pada Deputi 3	Website, Instagram, JOFI, SISDI
	Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas harmonisasi dan penelaahan produk hukum	Desember 2024	Berkoordinasis dengan UKE II atas produk hukum yang akan dikeluarkan	Laporan atas pelaporan produk hukum yang dikeluarkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Koordinasi dan evaluasi dengan bagian Hukum Sekretariat
	Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	98%	Tercapainya target persentase atas serapan anggaran	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait langka-langkah strategis penyerapan anggaran	Laporan atas realisasi anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pelaporan atas serapan angaran
	Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas realisasi capaian output	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pelaporan atas realisasi dan evaluasi capaian output	Laporan atas pelaporan capaian output berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada UKE II	Website Sakti dan MONEVPA DJPb
	Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pelaporan BMN	Desember 2024	Melakukan analisis terkait pengisian data dukung untuk pelaporan BMN Semesteran atau Tahunan	Penyampaian Laporan BMN ke Bagian BMN di Sekretariat Kemenpora	Aplikasi SAKTI Modul Asset dan Persediaan
	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	Tercapainya target persentase atas ASN yang diberikan pengembangan kompetensi	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pegawai pada tahun 2024	-	-
	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	Tercapainya target nilai atas PM SAKIP	Januari 2024	Mengikuti review LKI dengan APIP dan menindaklanjuti	BA Pemeriksaan PM SAKIP	APIP
	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	Tercapainya target persentase atas penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan pada LHP BPK	Desember 2024	Melakukan tindak lanjut hasil temuan BPK	LHP BPK sampai dengan 2022	Excel rangkuman temuan dan tindak lanjutnya
	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pengisian data pengadaan dan diumumkan pada Website SIRUP	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan pengumuman pada SIRUP terkait paket penyedia, non penyedia, maupun swakelola yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian persentase pengumuman pengisian	Website SIRUP
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85	Tercapainya target nilai atas pengawasan kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Juni-Juli 2024	Koordinasi dan evaluasi dengan bagian kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian atas penilaian atas kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penilaian kearsipan dari bagian kearsipan Sekretariat Kemenpora dan ANRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90	Tercapainya target indeks atas kepuasan masyarakat	Januari s.d. Desember 2024	Meningkatkan kualitas pelayanan pada Sesdep 3 kepada masyarakat dan penerima layanan internal	Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM)	Website E-SKM Kemenpora

NOTA DINAS Sesmen ke Unit Kerja ttg Penyelesaian Revisi Penghematan Perjalan Dinas TA 2024

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

NOTA DINAS

Nomor: PR.03.01/11.12.1/SET/XI/2024

Yth	:	1. Para Deputi 2. Para Sesdep dan Asdep 3. Para Kepala Biro 4. Inspektur 5. KPA 34 Satker Dekonsentrasi
Dari	:	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sifat	:	**SEGERA**
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Tanggal	:	12 November 2024
Perihal	:	Penyelesaian Revisi Anggaran Penghematan Perjalanan Dinas TA 2024

Merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Ta 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat Menkeu dimaksud, setiap K/L diminta untuk meneliti Kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan **minimal penghematan 50% (lima puluh persen)** dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 sejak surat Menkeu ditetapkan.
2. Sesuai surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-445/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, **total anggaran penghematan perjalanan dinas pada Kementerian Pemuda dan Olahraga** adalah sebesar **Rp34.083.791.000,-** (*tiga puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tiujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
3. Rincian penghematan belanja perjalanan dinas per satker pusat, setelah melalui keputusan pimpinan, **disepakati** sebagai berikut:

No	Kode Satker	Satker	Penghematan
1	418137	Bidang Pemberdayaan Pemuda	4.417.000.000
2	418138	Bidang Pengembangan Pemuda	6.045.000.000
3	418139	Bidang Pembudayaan Olahraga	5.097.000.000
4	418140	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	15.073.791.000
5	418135	Kesekretariatan Kemenpora	3.450.000.000
Total			**34.083.791.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NOTA DINAS Sesmen ke Unit Kerja ttg Penyelesaian Revisi Penghematan Perjalan Dinas TA 2024

4. Dalam penyelesaian usulan revisi RKA-K/L TA 2024 untuk memenuhi target penghematan dimaksud, agar memperhatikan hal-hal khusus, yakni:
   a. **Hanya melakukan revisi dari seluruh akun belanja perjalan dinas tanpa dibatasi sumber dananya**.
   b. **Usulan revisi dilakukan oleh masing-masing satker** dengan total penghematan/*self blocking* sebagaimana dimaksud pada poin 3 surat ini.
   c. Memastikan usulan revisi **hanya berupa revisi penghematan/*self blocking* saja** (tidak ditambah dengan revisi lainnya, kecuali pemutakhiran KPA yang tidak mengubah anggaran perjalanan dinas)
   d. Melampirkan
      - **Surat usulan revisi anggaran** dari Kuasa Pengguna Anggaran ke Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
      - **Surat pernyataan Eselon I pada masing-masing satker** yang menyatakan bahwa target penghematan sudah terpenuhi melalui revisi Eselon I.
      - **Surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran** bahwa Satuan Kerja sudah berkoordinasi dengan Eselon I.
   e. Seluruh satuan kerja agar menyelesaikan seluruh penginputan usulan revisi penghematan belanja perjalanan dinas kedalam aplikasi SAKTI dan mengunggah data dukungnya, **maksimal tanggal 15 November 2024 pukul 09.00 WIB**.
   f. Apabila dikemudian hari, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas kembali di masing-masing satker, agar dilakukan revisi POK sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan pemutakhiran revisi POK di Kanwil DJPb DKI Jakarta **maksimal 29 November 2024**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gunawan Suswantoro

Tembusan:
1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.